



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL MIGAS

Issue 17 Januari-Juni 2026

Indonesia Terus Buka Peluang

Investasi Migas



ISSN 2528-4169



SAJIAN UTAMA

Hilirisasi dan Reformasi Hulu
Migas Perkokoh Ketahanan
Energi Nasional

SOROT

Akselerasi Infrastruktur
Energi Dorong Terwujudnya
Swasembada Energi Nasional

KOLOM

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Hilir Migas Pasca Permen
ESDM Nomor 7 Tahun 2026



Lawan KORUPSI

Demi Kemakmuran Negeri...



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id



Indonesia Terus Buka Peluang Investasi Migas

JURNAL **MIGAS**
Issue 17 Januari-Juni 2026



Pada dasarnya, ketahanan energi merupakan kemampuan suatu negara memastikan ketersediaan energi yang memadai, terjangkau, dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Salah satunya ditempuh melalui penguatan regulasi subsektor migas yang adaptif serta peningkatan iklim investasi secara masif guna mengejar target transisi energi.

Dalam jangka panjang, Indonesia menargetkan bauran energi yang lebih hijau dengan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) yang meningkat. Meski begitu, migas tetap diposisikan sebagai komponen yang saling melengkapi dalam proses transisi energi.



10

>> SAJIAN UTAMA

Hilirisasi dan Reformasi Hulu Migas Perkokoh Ketahanan Energi Nasional

Hilirisasi dan reformasi hulu minyak dan gas bumi (migas) berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta mengoptimalkan produksi migas. Tak pelak, hilirisasi dan reformasi hulu migas menjadi krusial untuk mencapai swasembada serta memperkuat ketahanan energi nasional.



6

>> SAJIAN UTAMA

Indonesia Terus Buka Peluang Investasi Migas

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkomitmen menjaga keseimbangan antara daya saing investasi dan optimalisasi penerimaan negara. Keduanya baru bisa terwujud dengan memastikan pengelolaan sektor migas berjalan andal, transparan, dan berkelanjutan.



>> SOROT

Akselerasi Infrastruktur Energi Dorong Terwujudnya Swasembada Energi Nasional

JURNAL MIGAS Issue 17 Januari-Juni 2026

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
ISSN 2528-4169

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas
Redaktur **Akhmad Fauzi Budiman**
Editor **Krisna Dinda Bestari,**
Rizky Amalia Wismashanti
Desain Grafis **Fadhillah Annur**
Pembuat Artikel **Ivone Rosa Amilia,**
Naufal Noor Rochman, Asti
Murdaningsih, Ihda Nur Muhtada,
Muhammad Shafa Ucca Vania
Sekretariat **Hafriansa Walid, Elda**
Fitri Hasari

6 SAJIAN UTAMA

Indonesia Terus Buka Peluang
Investasi Migas

10 Hilirisasi dan Reformasi Hulu Migas Perkokoh Ketahanan Energi Nasional

14 SOROT

Akselerasi Infrastruktur Energi
Dorong Terwujudnya Swasembada
Energi Nasional

20 KOLOM

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Hilir Migas Pasca Permen
ESDM Nomor 7 Tahun 2026

23 Pengelolaan Bahan Peledak Migas yang Andal dan Aman melalui Persetujuan Gudang dan Juru Tembak

26 Membuka Era Baru Migas Non Konvensional: Dari Pembuktian MNK Rokan Menuju Ekosistem dan Ketahanan Energi Nasional

30 NEWS

Dirjen Migas Lantik Sejumlah
Pejabat Fungsional

Ditjen Migas Peringati Bulan K3
Nasional Lewat Berbagai Kegiatan

RDMP Balikpapan Dukung
Swasembada Solar Kementerian

ESDM Gelar Penghargaan
Keselamatan Migas 2025

Ditjen Migas Akan Nilai
Penerapan SMK

Sambut Ramadhan, Dirjen
Migas Ajak Pegawai Tetap
Produktif dan Jaga Integritas

Dorong Produktivitas, Ditjen
Migas Bekali Pegawai Strategi
Kelola Stres

Dukung Proyek Swasembada
Energi, Ditjen Migas Raih Apresiasi

Perkuat Pengawasan Maritim
Sektor Migas, Ditjen Migas Pererat
Kerja Sama dengan TNI AL

Ditjen Migas Respons Cepat Atasi
Kelangkaan BBM dan LPG di
Pontianak dan Tuban

Ditjen Migas Tekankan
Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai

Pastikan Distribusi Lancar, Dirjen
Migas Tinjau Distribusi LPG 3 kg di
Jakarta

Ditjen Migas Tampung Aspirasi
Rancangan Aturan Wajib SNI dan
SKKNI

Visi Hilir Indonesia 2045 Cakup
Tiga Aspek Utama

Gandeng INKAI, Dojo Karate Ditjen
Migas Resmi Berdiri

Penguatan Regulasi dan Kolaborasi
Dorong Pengembangan CCUS

Sinergi, Inovasi Teknologi dan HSSE
Penting dalam Peningkatan
Produksi Migas

Ditjen Migas dan Kejaugung
Tanda Tangani Pakta Integritas Kawal
Proyek Strategis Nasional

Dorong Pengembangan Hulu Migas
Papua, Ditjen Migas Tekankan
Sinergi

Pangkas Beban Subsidi LPG,
Pemerintah Siapkan Roadmap
Konversi ke CNG

Gelar *Kick Off Meeting* RSNI
2026, Komitmen Nyata Dorong
Standardisasi Hulu Hingga Hilir
Migas

Dirjen Migas Tekankan
Sinergi Hadapi Tantangan
Energi Global Sektor energi

Total Komitmen Investasi
USD43,5 Juta, Inilah Empat
Pemenang Lelang Wilayah Kerja

Mabelo Terbuka untuk Investor

Ini 9 Pemenang Lelang Wilayah
Kerja Tahap II dan III Tahun 2025

Pemerintah Lelang 13 Wilayah
Kerja

Indonesia Terus Buka Peluang INVESTASI MIGAS



Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkomitmen menjaga keseimbangan antara daya saing investasi dan optimalisasi penerimaan negara. Keduanya baru bisa terwujud dengan memastikan pengelolaan sektor migas berjalan andal, transparan, dan berkelanjutan.

Investasi migas di tanah air masih terbuka lebar. Tambah pula, Pemerintah menerapkan beberapa langkah strategis guna menghadapi tantangan penurunan produksi minyak nasional. Langkah ini dilakukan dengan memacu aktivitas di sektor hulu migas melalui tiga strategi utama yaitu optimalisasi teknologi, reaktivasi sumur tua atau *idle* dan percepatan eksplorasi di wilayah Timur Indonesia.

110 blok migas baru

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman saat menjadi pembicara sesi diskusi panel Hulu & Hilir Migas pada acara Energy Outlook 2026 yang bertema *Exploring Indonesia's Energy Policy: Self-sufficient and Pro-people* di Jakarta, Kamis (5/2/2026), memaparkan bahwa per Januari 2026, Pemerintah telah menyiapkan 110 area potensi Wilayah Kerja

(WK) migas baru yang mencakup sumber daya konvensional maupun nonkonvensional.

“Dari 110 area potensi WK tersebut, 19 area telah diminti atau laku (*awarded*), 39 area dalam tahap *joint study*, dan 52 area potensi lainnya. Area ini mencakup potensi konvensional maupun non-konvensional seperti *shale gas* dan *coal bed methane*,” ujar Laode.

Pengembangan 110 area potensi WK ini difokuskan pada kombinasi teknologi tinggi, kebijakan insentif, dan fleksibilitas kontrak untuk menarik investor di sektor hulu. Langkah ini diharapkan dapat membalikkan tren penurunan produksi nasional dan membawa Indonesia kembali menuju kemandirian energi. Selain itu, Pemerintah juga tengah melirik potensi besar dari aset-aset yang sudah ada namun belum optimal. Saat ini, teridentifikasi sebanyak 6.305 sumur *idle* di seluruh Indonesia yang memiliki potensi hidrokarbon.

“Terdapat 6.305 sumur *idle* yang memiliki potensi hidrokarbon. Sebanyak 787 sumur dapat segera di-reaktivasi dan hampir empat ribu sumur lainnya berpotensi untuk dikerjasamakan guna mendorong penambahan produksi minyak Indonesia,” lanjut Laode.



Sebanyak 10 area dari 110 blok migas di atas telah ditawarkan ke publik awal tahun ini. Kesepuluh area tersebut adalah Rupert, Puri, Karapan Baru, Pesut Mahakam, Bengara II, Maratua II, South Matindok, Lao-Lao, Rombebai, dan Northern Papua / Jayapura.

“Ada 10 (sepuluh) area potensi blok migas baru yang telah selesai dilakukan studi oleh Badan Geologi dan LEMIGAS dibuka untuk calon investor. Studi tersebut merupakan bagian dari peran aktif Pemerintah melalui Badan Geologi dan LEMIGAS untuk meningkatkan kualitas data migas agar calon investor migas lebih tertarik utamanya dalam eksplorasi migas. 10 area tersebut merupakan bagian dari 110 area potensi blok migas baru yang tempo hari dibuka oleh Kementerian ESDM secara luas,” papar Laode di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Laode juga menambahkan bahwa pihaknya mengundang para calon investor yang memiliki kapabilitas untuk menyampaikan minat melalui dua metode, yaitu Penawaran Langsung melalui Studi Bersama atau Lelang Reguler. Untuk mempermudah calon investor, Ditjen Migas juga membuka layanan *coaching* untuk persiapan proposal Studi Bersama atau persiapan proposal Lelang Reguler.

Meskipun saat ini tengah menghadapi tantangan *natural decline*, Laode menyampaikan bahwa kinerja di tahun 2025 memberikan optimisme dengan realisasi *lifting* minyak mencapai 605,3 MBOPD atau 100,05% dari target APBN. Sedangkan untuk *lifting* gas bumi di tahun 2025 lalu mencapai rata-rata 951,8 MBOEPD. Meski demikian, pada tahun 2025, seluruh kebutuhan gas tersebut dipasok dari produksi gas

dalam negeri, tidak ada yang berasal dari impor.

“Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan gas domestik, di mana dari total produksi 5.600 BBTUD, sebanyak 69% atau 3.908 BBTUD telah dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri tanpa bergantung pada impor gas,” ungkap Laode.

Terbuka terhadap kontribusi berbagai pihak

Satu hal yang pasti, Ditjen Migas terbuka terhadap kontribusi berbagai pihak dalam pengelolaan migas di tanah air.

“Pemerintah terbuka terhadap masukan dari para pelaku industri dan lembaga kajian. Studi seperti ini bisa menjadi salah satu referensi penting bagi kami untuk terus memperbaiki iklim investasi

hulu migas, tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan tata kelola yang baik,” kata Laode dalam Diskusi Studi Penilaian Kompetitif Sektor Migas di Indonesia bersama Indonesian Petroleum Association (IPA) serta S&P Global yang dilaksanakan di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

“Kami menyadari bahwa sektor hulu migas memiliki karakteristik risiko tinggi dan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan yang stabil, transparan, dan kompetitif menjadi prasyarat utama agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi migas yang menarik di kawasan,” tambahnya.

Ditjen Migas juga mendorong kolaborasi dengan badan usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi nasional. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai program strategis sektor migas sekaligus mendukung agenda transisi energi secara bertahap.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Ditjen Migas menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sektor migas yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, sejalan dengan arah kebijakan energi nasional.

Pemerintah juga terus berkomitmen menciptakan iklim investasi hulu migas yang atraktif melalui berbagai kebijakan fiskal baru. Beberapa kemudahan yang ditawarkan antara lain seperti *fiscal terms* yang semakin menarik dengan *split* KKKS hingga 50% (sebelumnya hanya 15-30%), fleksibilitas kontrak migas di mana KKKS dipersilahkan memilih jenis kontrak, baik *cost recovery* atau *gross*

split, insentif hulu migas untuk optimalisasi produksi dan pembebasan *indirect tax* pada masa eksplorasi.

“Pemerintah saat ini semakin terbuka dan aktif turun langsung dalam fasilitasi percepatan perizinan dan birokrasi lintas instansi. Pemerintah juga melakukan eksplorasi langsung dengan pembiayaan APBN (termasuk seismik), untuk mengurangi risiko eksplorasi dan mendorong investasi,” pungkas Laode.

Rekalibrasi diplomasi energi

Krisis energi global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran pada periode Februari hingga April 2026 ini berdampak pada pasokan energi nasional. Terkait hal ini, Indonesia sedang melakukan recalibrasi diplomasi energi sebagai salah satu langkah strategis Pemerintah untuk mengamankan pasokan energi nasional. Indonesia dinilai sangat rentan terhadap penutupan Selat Hormuz, yang berpotensi memutus sekitar 20% pasokan kebutuhan komoditas migas nasional yang diimpor dari kawasan Timur Tengah.

“Kita tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan *business-as-usual*. Penguatan ketahanan energi memerlukan strategi komprehensif, mulai dari diversifikasi sumber impor hingga pengelolaan cadangan energi nasional yang efektif,” ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro yang mewakili Laode dalam pembukaan S&P Global Energi Forum ‘*Oil & Gas Market Briefing*’ di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Pemerintah saat ini mengedepankan pendekatan kerja sama luar negeri ‘bebas-aktif’ dengan memprioritaskan ketersediaan bahan bakar domestik dengan harga yang

kompetitif melalui kerja sama dengan sumber-sumber pasokan yang baru.

Mitigasi dampak perubahan iklim

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Migas yang diwakili oleh Koordinator Kerja Sama Migas Pinta Uly Talytha Kummy dalam *workshop* “*Managing Methane Emissions in the Fossil Fuel Sector*” yang diselenggarakan Ditjen Migas bekerja sama dengan International Energy Agency (IEA) di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo, Jakarta, Selasa (20/1/2026), menekankan pentingnya menyeimbangkan target ketahanan energi dengan perlindungan lingkungan. Pihaknya menyampaikan bahwa peningkatan produksi migas dan akses energi terjangkau tetap menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Energi *supply* dan perubahan iklim telah menjadi isu yang menantang di banyak negara. Kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk emisi metana, guna memitigasi dampak perubahan iklim, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam Global Methane Pledge sejak 2022,” ujar Pinta.

Hingga saat ini, metana berkontribusi terhadap 30% kenaikan suhu global sejak revolusi industri. Berdasarkan data IEA Global Methane Tracker 2025, sektor energi menyumbang lebih dari 35% emisi metana antropogenik, dengan emisi dari sektor migas global pada tahun 2024 masih mendekati rekor tertinggi, yakni sekitar 120 juta ton. Pengurangan emisi metana yang cepat dan berkelanjutan berperan penting dalam membatasi pemanasan global jangka pendek dan memperbaiki kualitas udara.

Pinta pada kesempatan yang sama juga menyampaikan meskipun

Indonesia memprioritaskan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi gas rumah kaca tetap menjadi agenda krusial. Saat ini, regulasi terkait manajemen emisi metana yang ada di Indonesia masih berfokus pada pengelolaan gas suar (*flaring*) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah menargetkan pencapaian *Zero Routine Flaring* di tahun 2030 sebagai bagian dari kontribusi terhadap Global Methane Pledge.

Pada kesempatan tersebut, IEA Legal Counsel K.C. Michaels juga memberikan paparan terkait emisi metana global dan strategi regulasi dalam mengelola emisi metana. K.C. menyampaikan bahwa pihaknya sangat membuka kesempatan untuk berdiskusi secara khusus terkait kebutuhan dan berbagai kendala yang dihadapi di Indonesia, baik dari sisi badan usaha maupun Pemerintah.

“Berdasarkan temuan keseluruhan kami adalah bahwa 75% emisi secara teknis dapat dikurangi di Indonesia, dan hampir dua pertiga dari jumlah tersebut berpotensi dapat dikurangi *no net cost*. Tentu saja, kami sangat membuka kesempatan untuk berdiskusi secara khusus terkait kebutuhan dan berbagai kendala yang dihadapi di Indonesia, baik dari sisi badan usaha maupun Pemerintah, juga berdiskusi terkait potensi dukungan yang bisa kami berikan dengan sumber daya yang kami miliki. Salah satu hal yang menjadi fokus utama kami adalah mencoba mengembangkan hubungan dan koneksi antar Pemerintah untuk berbagi pengalaman,” kata Michaels. ●

Hilirisasi dan Reformasi Hulu Migas Perkokoh Ketahanan Energi Nasional

Hilirisasi dan reformasi hulu minyak dan gas bumi (migas) berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta mengoptimalkan produksi migas. Tak pelak, hilirisasi dan reformasi hulu migas menjadi krusial untuk mencapai swasembada serta memperkuat ketahanan energi nasional.



Salah satu langkah strategis Pemerintah dalam menjaga kedaulatan energi nasional di tengah eskalasi geopolitik global yang kian menantang ialah melalui pencapaian swasembada energi sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman saat membuka forum Energy Council Jakarta 2026 di Hotel Four Seasons Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Langkah mitigasi di tengah gejolak geopolitik global

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) telah menjalankan beberapa langkah mitigasi komprehensif pasca penutupan Selat Hormuz imbas ketegangan di Timur Tengah yang merupakan jalur krusial bagi rata-rata 20% pasokan minyak mentah di Indonesia.

“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” papar Laode.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah mengumumkan adanya temuan besar (*major discovery*) di Sumur Geliga, Blok Ganai, yang diperkirakan memiliki potensi gas sebesar 5 tcf dan 300 mmbbl kondensat.

“Temuan ini menjadi pilar penting untuk mengejar target produksi minyak yang diproyeksikan mencapai 610 MBOPD pada 2026. Di samping itu, Pemerintah juga menempuh beberapa langkah strategis untuk mencapai target produksi tersebut antara lain seperti membuka 116 blok migas baru bagi investor global melalui penawaran wilayah kerja migas serta membuka kolaborasi teknologi dan operasi pada wilayah kerja *existing* melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” pungkaskan Laode.

Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, Ditjen Migas juga telah melakukan transformasi regulasi secara fundamental melalui fleksibilitas kontrak yang memungkinkan investor bebas memilih atau beralih antara skema *gross split* dan *cost recovery*, perbaikan fiskal dengan melakukan penyesuaian pembagian hasil (*split*) dengan profil risiko lapangan dan pemberian insentif berbasis keekonomian proyek serta akselerasi perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang menjamin kepastian waktu persetujuan perizinan.

Laode menambahkan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan sumber daya yang besar tetapi juga peluang nyata. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan investasi dapat bergerak lebih cepat dengan kepastian yang lebih besar.

“Reformasi sedang berlangsung. Peluang tersedia. Pemerintah mengundang para investor untuk menjadi bagian dari babak

selanjutnya Indonesia di sektor hulu migas,” pungkaskan.

Mendorong kerja sama bilateral

Laode mengungkapkan, subsektor migas merupakan penggerak utama dalam mewujudkan proses transisi yang stabil, realistis, dan berkeadilan. Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan melebarnya jarak (*gap*) antara produksi dan konsumsi minyak bumi, di mana produksi harian berada di kisaran 605 ribu barel, sementara konsumsi nasional telah melampaui 1,5 juta barel per hari. Kondisi ini meningkatkan ketergantungan pada impor, yang secara langsung menekan neraca perdagangan sekaligus ketahanan energi nasional.

“Sektor minyak dan gas bumi masih memainkan peran yang sangat strategis dalam strategi ketahanan energi kita. Oleh karena itu, posisi Pemerintah sangat jelas, meningkatkan produksi minyak, dan di saat yang sama, menempatkan gas sebagai jembatan dalam periode transisi energi,” ujar Laode dalam sesi plenary bertajuk “*Path to Energy Resilience and The Role of Partnership*” pada rangkaian The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Rabu (20/5/2026).

Gas relatif lebih bersih daripada bahan bakar fosil lainnya, dengan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak dan batubara, namun tetap mampu menjadi bahan bakar untuk mendukung sektor industri dan kelistrikan. Selain itu, Indonesia masih memiliki cadangan gas yang melimpah dan Pemerintah juga tengah mendorong pengembangan energi terbarukan, bioenergi, serta teknologi rendah karbon seperti *Carbon Capture and Storage* (CCS) dan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS).

Di samping itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik dan adaptif untuk mendorong investasi jangka panjang di sektor hulu migas. Menurut Laode, kepercayaan dari para investor dan pelaku industri tidak bisa dibangun secara instan. “Peran Pemerintah saat ini tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, dan mitra strategis dalam membangun masa depan energi yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Pembentukan Tim Satuan Tugas Nasional Percepatan Lifting Migas (Satgas Lifting Migas) menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dan merupakan tonggak penting dalam mengurai kompleksitas birokrasi di sektor hulu migas. Satgas ini menjadi bentuk sinergi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas serta kementerian dan lembaga terkait lainnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

“Melalui mekanisme Satgas ini, koordinasi menjadi lebih fokus, cepat, dan berorientasi pada solusi untuk mengatasi hambatan operasional di lapangan yang berdampak langsung pada target lifting nasional. Isu perizinan, akses lahan, kesiapan infrastruktur, pengadaan, hingga persetujuan lingkungan kini dapat dieskalasi dan diselesaikan secara terpadu demi mempercepat produksi,” papar Laode.

Namun demikian, guna memastikan keberlanjutan investasi hulu yang berdampak langsung pada ketahanan energi nasional dan penerimaan negara, Pemerintah terus memprioritaskan penguatan koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara Pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait tata ruang, akuisisi lahan dan proses perizinan.

Singkatnya, Pemerintah terus berupaya mendorong investasi hulu migas, memperluas kerja sama bilateral, serta terus melakukan reformasi regulasi dan fiskal yang akomodatif bagi investor global.

Hal ini diamini oleh Direktur Pembinaan Program Migas Hendra Gunawan saat mewakili Direktur Jenderal Migas membuka gelaran Business Forum dalam rangkaian IPA Convex 2026 di hari dan tempat yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Hendra menegaskan bahwa industri migas nasional tetap memegang peranan krusial bagi ketahanan energi Indonesia di tengah tantangan

penurunan produksi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik dan adaptif.

“Industri ini adalah tulang punggung ketahanan energi nasional kita. Kita memiliki sejarah industri migas selama lebih dari satu abad, namun saat ini kita menghadapi tantangan penurunan produksi migas. Oleh karena itu, kami mencari mitra potensial untuk mengembangkan industri ini,” pungkas Hendra.

Hendra menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat para investor global di sektor hulu, antara lain seperti

fleksibilitas kontrak, insentif fiskal atau nonfiskal, penyederhanaan perizinan, penyesuaian regulasi untuk migas nonkonvensional, serta peningkatan manajemen dan akses data hulu migas.

Pengembangan gas nonkonvensional

Pemerintah Indonesia juga telah melirik potensi gas nonkonvensional guna mendukung ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah coal bed methane (CBM) atau gas metana batubara.

Mewakili Laode dalam Penandatanganan Perjanjian Kolaborasi (*Collaboration Agreement*) antara NuEnergy Gas Limited dan PT

Beijing Energy Linking (PT BEL) di Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (8/1/2026), Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Nanang Abdul Manaf mengungkapkan hal di atas.

“Penandatanganan ini menjadi momentum lanjutan setelah pencapaian sejarah pada 17 Desember 2025 melalui penandatanganan Gas Sales and Purchase Agreement (GSA) pertama untuk CBM di Indonesia dengan nilai kontrak mencapai USD200 juta,” ujar Nanang.

Pemerintah pada kesempatan tersebut juga memastikan agar pengembangan CBM, khususnya di Blok Tanjung Enim, segera ditetapkan

sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan adanya penetapan status PSN, diharapkan akan mendapatkan dukungan lintas sektor yang lebih kuat, percepatan perizinan dan kemudahan penggunaan lahan guna mengejar target produksi gas nasional 12 bscfd di tahun 2030.

“Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalis terbentuknya CBM Hub di Sumatera Selatan untuk menjamin aliran gas domestik yang berkelanjutan dan mendukung swasembada energi dalam transisi energi bersih,” papar Nanang.

Nanang menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas akan selalu terbuka

untuk diskusi mengenai tantangan teknis atau regulasi di lapangan. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi di sektor ini tetap menarik, aman dan berkelanjutan. “Kehadiran kami di sini adalah untuk menegaskan dukungan penuh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan potensi sumber daya GMB menjadi kenyataan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah berharap melalui penandatanganan Perjanjian Kolaborasi (*Collaboration Agreement*) ini dapat meningkatkan standar operasional serta memberikan efek domino ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat Sumatera Selatan. ●



Akselerasi INFRASTRUKTUR ENERGI

Dorong Terwujudnya Swasembada Energi Nasional

Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur energi. Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi dunia, akselerasi infrastruktur energi menjadi makin krusial.



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman mengungkapkan, isu mengenai keterbatasan cadangan energi nasional belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Namun, kondisi tersebut bukanlah hal yang baru karena ketahanan cadangan energi nasional selama ini memang berada pada kisaran yang relatif sama. Pihaknya menegaskan bahwa dinamika geopolitik global memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pasokan energi.

“Kondisi geopolitik sangat memengaruhi sektor energi. Ketika terjadi ketegangan atau konflik di suatu kawasan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat, tetapi juga oleh negara lain yang bergantung pada jalur distribusi energi global,” ujarnya dalam Energy Iftar Forum 2026 yang diselenggarakan oleh ASPEBINDO, bertempat di Tribra Hotel & Convention Center, Jakarta, (12/3/2026).

Sejumlah langkah menjaga stabilitas energi

Laode menambahkan bahwa Pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional, baik melalui penguatan infrastruktur energi maupun pengelolaan cadangan energi secara lebih optimal.

Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur gas bumi nasional. Pihaknya menyampaikan bahwa pembangunan jaringan transmisi pipa gas bumi terus dipercepat untuk meningkatkan konektivitas energi antarwilayah.

“Ke depan kita ingin memastikan infrastruktur gas nasional semakin terintegrasi. Pembangunan pipa transmisi gas dari Jawa Timur hingga Jawa Barat ditargetkan selesai pada 2026, dan selanjutnya jaringan transmisi gas dari Aceh hingga Jawa Timur diharapkan sudah terhubung pada 2028,” lanjutnya.

Selain mendukung swasembada energi, pembangunan infrastruktur gas bumi juga diharapkan memberikan dampak positif bagi daerah. Infrastruktur tersebut dapat menjadi katalis investasi hulu migas, mendorong pertumbuhan kawasan industri baru, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang lebih bersih, aman, dan terjangkau.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, Ditjen Migas optimistis sektor migas tetap menjadi salah

satu pilar penting dalam mendukung swasembada energi nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain pembangunan infrastruktur energi, Pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional.

Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang besar, termasuk bioenergi yang dapat mendukung penguatan bauran energi nasional. Pengembangan bahan bakar nabati, seperti bioetanol maupun peningkatan program biodiesel, juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

“Ketahanan energi tidak hanya dilihat dari sisi pasokan, tetapi juga bagaimana kita mengelola permintaan energi secara efisien. Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan antara *supply* dan *demand* agar sistem energi nasional tetap stabil,” papar Laode.

Dalam kesempatan tersebut, Laode juga memaparkan kondisi stok energi nasional yang secara umum masih berada pada level aman. Berdasarkan data per 9 Maret 2026, ketahanan stok beberapa jenis bahan bakar minyak tercatat masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan seperti Pertalite (RON 90) tercatat sekitar 25 hari, Pertamina (RON 92) 26,56 hari, Pertamina Turbo (RON 98) 23,26 hari, Pertamina Dex (CN 53) 44,43 hari dan Avtur 38,42 hari, serta Solar (CN 48) berada pada kisaran 16,28 hari.

Laode juga menambahkan bahwa Pemerintah saat ini juga terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama menjelang periode kebutuhan energi yang berpotensi meningkat pada bulan-bulan mendatang.

“Kami terus melakukan berbagai upaya dan inovasi agar ketersediaan energi tetap terjaga dan tidak menimbulkan gangguan pasokan di masa mendatang. Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat,” ia menekankan.

Pendekatan 4A

Pada kesempatan terpisah, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Agung Kuswardono, diwakili Koordinator Perencanaan dan



Pembangunan Infrastruktur Migas Sugiarto menyampaikan, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada energi melalui pendekatan 4A, yaitu *Availability*, *Accessibility*, *Affordability*, dan *Acceptability*,

Lebih lanjut Sugiarto menjelaskan, *Availability* sebagai kondisi ketersediaan energi dan sumber energi baik dari dalam negeri maupun impor. *Accessibility* yaitu kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik. *Affordability* sebagai keterjangkauan biaya investasi energi baik biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, serta keterjangkauan konsumen untuk membayar energi. Terakhir, *Acceptability* yaitu penerimaan masyarakat terhadap penyediaan energi terkait dengan lingkungan.

Dalam konteks transisi energi, Sugiarto menekankan peran gas bumi sebagai energi transisi yang strategis. Selain memiliki cadangan yang relatif

lebih melimpah dibandingkan minyak bumi, gas bumi juga lebih ekonomis dan menghasilkan emisi yang lebih rendah, sehingga mendukung target penurunan emisi nasional.

“Gas bumi, termasuk LNG, menjadi pilihan utama dalam masa transisi energi karena lebih bersih dan andal, sekaligus mampu menjaga kesinambungan pasokan energi nasional,” jelasnya dalam acara bertajuk “Sinema, *Outlook* Politik Ekonomi Migas Riau 2026–2030”, Sabtu (7/2/2026).

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi

Selain itu, di sektor hilir, penguatan infrastruktur menjadi fokus utama dimana saat ini tengah berlangsung pembangunan dua proyek strategis nasional, yakni pipa Cisem Tahap II ruas Batang–Cirebon–KHT sepanjang 245 km dan Pipa Dusem (Dumai–Sei Mangkei) sepanjang 542 km yang menghubungkan wilayah Sumatera Utara dan Riau.

Pembangunan pipa ini dirancang untuk mengintegrasikan jaringan transmisi gas antarwilayah, membuka akses pasokan yang lebih luas bagi sektor industri dan pembangkit listrik, serta meningkatkan fleksibilitas distribusi energi nasional.

Terkait pipa Dusem, pengiriman perdana telah dilakukan pada Kamis (19/2/2026). Saat peresmian pengiriman perdana proyek pipa Dusem di pabrik PT Krakatau Pipe Industries (KPI), Cilegon, Banten Laode menyampaikan, pembangunan pipa transmisi gas Dusem merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan Pemerintah dalam program diversifikasi energi dan percepatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

“Pemerintah masih terus mengupayakan pembangunan infrastruktur pipa transmisi gas bumi dalam upaya merealisasikan kemudahan akses gas dengan menjangkau beberapa wilayah

di Indonesia. Pembangunan pipa transmisi gas bumi ini bertujuan memberikan akses energi kepada sektor industri, komersial, dan masyarakat,” papar Laode.

Proyek jaringan pipa transmisi gas Dusem sepanjang total kurang lebih 541,8 km dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen 1 SKG Belawan sampai dengan Stasiun Labuhan Batu sepanjang 279,8 km dengan kontraktor pelaksana KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Nindya Karya memiliki nilai kontrak Rp 3,6 Triliun dan Segmen 2 Stasiun Labuhan Batu sampai dengan Fasilitas Duri sepanjang 262 km dengan kontraktor pelaksana KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Sumber Bangun Sentosa – PT Singgar Mulia memiliki nilai kontrak Rp 2,8 Triliun.

Berdasarkan data laporan proyek hingga minggu ke-8, pelaksanaan pekerjaan menunjukkan capaian yang sangat positif dan berada di atas target yang ditetapkan, realisasi pada

EPC Segmen 1 telah mencapai 12,447% dari rencana awal sebesar 7,638%, sementara EPC Segmen 2 mencapai 12,061% dari rencana awal sebesar 10,295%. Pipa yang digunakan dalam proyek ini juga merupakan pipa produksi dalam negeri dengan target komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) EPC sebesar 60,9% untuk Segmen 1 dan 62,49% untuk Segmen 2.

Percepatan *progress* fisik ini didukung oleh kelancaran distribusi material, di mana pengiriman pipa Batch 1 untuk Segmen 1 telah dimulai sejak 14 Februari 2026 dengan total sebanyak 1.900 batang melalui jalur laut menggunakan tongkang atau barge, yang akan segera disusul oleh pengiriman *Batch* 1 Segmen 2 dengan total sebanyak 130 batang per hari melalui jalur darat menggunakan armada *trailer lowbed* pada 23 Februari 2026.

Proyek yang memiliki nilai investasi dengan total pagu sebesar Rp6,5 triliun ini dirancang untuk memiliki volume desain sebesar 109,2 mmscf. Pembangunan yang telah dimulai sejak Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027 ini diharapkan dapat mengintegrasikan jaringan pipa transmisi gas di sepanjang Pulau Sumatera, guna mendukung hilirisasi industri dan penyediaan energi bersih bagi masyarakat.

Laode berharap proses pengiriman pipa dan pekerjaan pembangunan pipa transmisi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Namun, distribusi gas bumi di Indonesia kini tidak lagi semata bergantung pada jaringan pipa. Berbagai terobosan mulai dihadirkan agar gas bumi bisa menjangkau

lebih banyak kawasan industri dan pembangkit listrik. Untuk pertama kalinya di Pulau Jawa, gas produksi dalam negeri pun dicairkan menjadi *Liquefied Natural Gas* (LNG) dalam skala mini, menghadirkan cara penyaluran yang jauh lebih fleksibel bagi industri dan sektor ketenagalistrikan.

Transformasi tersebut ditandai dengan peresmian Kilang Mini LNG PT. Liquid Nusantara Gas di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Jawa Timur, oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Rabu (11/2/2026). Fasilitas ini menjadi kilang mini LNG pertama di Pulau Jawa dan diharapkan memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

“Peresmian kilang mini LNG PT. Liquid Nusantara Gas ini merupakan kilang LNG pertama di Pulau Jawa. Ini merupakan momentum bagaimana kita bisa memanfaatkan gas produksi dalam negeri, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan industri, pembangkit listrik, dan juga berbagai kegiatan ekonomi lain. Ke depan tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan LNG melalui kilang mini ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Yuliot.

Kilang Mini LNG milik PT. Liquid Nusantara Gas memanfaatkan pasokan gas dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Madura Strait yang dikelola oleh Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Gas tersebut kemudian diolah menjadi LNG agar lebih praktis dan efisien untuk didistribusikan ke pembangkit listrik, kawasan industri, serta berbagai pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

Proyek ini dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp247 miliar dan dirancang memiliki kapasitas

produksi sekitar 20 ton LNG per hari, atau hampir 7.000 ton per tahun.

Ia berharap kehadiran fasilitas ini dapat menjadi role model bagi para pelaku usaha di berbagai daerah dalam mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi gas, khususnya di wilayah-wilayah penghasil gas bumi di Indonesia.

Dalam rangka memperluas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga serta mendukung penguatan ketahanan energi nasional, Ditjen Migas juga melaksanakan Penandatanganan Kontrak Pembangunan dan Konsultan Pengawas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) Kabupaten Cirebon Tahap 1 bertempat di Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan penandatanganan kontrak ini menjadi tahapan awal koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jargas Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 dengan menghadirkan PT PGAS Solution sebagai kontraktor pembangunan dan PT Surveyor Indonesia sebagai konsultan pengawas.

Dalam sambutannya, Agung Kuswardono selaku Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek.

“Mohon pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan. Ketika nantinya dilakukan serah terima pekerjaan, kami berharap seluruh pekerjaan sudah memenuhi aspek kualitas maupun ketepatan waktu,” tegas Agung.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung percepatan

proses persiapan proyek hingga tahap penandatanganan kontrak.

“Saya mengapresiasi seluruh tim yang telah bekerja keras menyiapkan proses ini. Kami berharap koordinasi dan komitmen seluruh pihak terus terjaga agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal,” tambah Agung.

Pada kesempatan yang sama, Bambang Utoro selaku Inspektur IV Kementerian ESDM menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek akan dilakukan secara ketat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai regulasi dan standar yang berlaku.

“Kami akan memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai tata waktu, kualitas, dan ketentuan regulasi atau *compliance* yang berlaku. Karena pembangunan Jargas ini merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional,” jelas Bambang.

Pembangunan Jargas Kabupaten Cirebon Tahap 1 direncanakan mencakup sekitar 41 ribu lebih Sambungan Rumah (SR) yang tersebar di Kecamatan Palimanan, Gempol, Depok, dan Dukupuntang. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada 20 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.

Melalui pembangunan Jargas ini, Ditjen Migas berharap pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga dapat semakin meningkat sekaligus mendukung penyediaan energi yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Gas memainkan peran kunci

Dalam diskusi Energy Afternoon Talk bertajuk “Menjemput Peluang Besar Infrastruktur Migas di Tengah Kebutuhan Energi dan Industrialisasi Nasional,” Kamis (23/4/2026), Direktur Perencanaan dan



Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Agung Kuswardono menyampaikan bahwa jaringan pipa merupakan konsep paling ideal untuk distribusi energi dalam skala besar. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur migas di Indonesia bagian barat (Sumatera–Jawa) sudah relatif matang, dengan jaringan pipa gas yang terbangun sejak era 1980 hingga 1990-an dan terus berkembang hingga saat ini.

Lebih lanjut Agung menambahkan bahwa proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I dan II dengan Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem) di Sumatera merupakan bagian penting dalam menyambungkan jaringan pipa gas dari Sumatera hingga Jawa Timur. Konektivitas ini diharapkan akan memperkuat peran jaringan pipa sebagai *backbone* Nasional dalam mendukung distribusi energi yang andal dan terintegrasi.

“Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa Pemerintah sudah menyelesaikan Cisem Tahap I dan II. Ini legacy Ditjen Migas Kementerian ESDM bisa menyambungkan pipa dari ujung Sumatera sampai ke Jawa



Timur, dan pipa ini kalau sudah tersambung menjadi pipa terpanjang se-Asia,” tegasnya pada acara diskusi yang digagas Asosiasi Pemasok Energi Minyak dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO).

Di hadapan para pelaku usaha minyak dan gas bumi tersebut, Agung menyampaikan fokus Pemerintah saat ini diarahkan pada percepatan penyelesaian proyek pipa Dusem. Proyek konstruksi sepanjang kurang lebih 540 km ini merupakan investasi krusial karena membuka akses pasar gas yang sebelumnya terbatas. Pembangunan pipa tersebut menjadi enabler bagi lapangan gas baru yang sebelumnya tertahan karena tidak ada infrastruktur.

“Lapangan Andaman misalnya, memiliki potensi produksi sekitar 300 mmscf. Saat ini pasar lokal di Aceh & Sumatera hanya mampu menyerap sekitar 160 mmscf. Sisa pasokan perlu dialirkan ke Jawa melalui pipa,” jelas Agung menegaskan pentingnya pembangunan pipa tersebut.

Pengembangan lapangan migas Andaman sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pipa. Terlebih fleksibilitas dan desain Jaringan

pipa dirancang fleksibel (dua arah). Bisa mengalirkan gas dari barat ke timur atau sebaliknya. Hal tersebut mendukung distribusi gas yang saat terjadi surplus ataupun defisit di wilayah tertentu.

Selain mendorong investasi hulu migas, adanya pembangunan pipa gas tersebut juga mendukung terhadap peningkatan produksi (*lifting*) migas nasional. Agung mencontohkan bahwa saat ini Blok Rokan membutuhkan gas sebagai *steam flood* untuk meningkatkan produksi minyak, dimana kebutuhan tersebut juga akan disuplai dari jaringan pipa.

Berbeda untuk wilayah Indonesia Bagian Timur, menurut Agung pengembangan Infrastruktur di Indonesia Timur lebih menantang dan mahal. Konsep ini tengah dikaji lebih lanjut, meskipun untuk wilayah tertentu seperti Sulawesi tetap dipertimbangkan pembangunan pipa yang saat ini masih dalam tahap studi dan evaluasi hasilnya. Selain itu Pemerintah juga tengah mengkaji alternatif solusi dengan membangun LNG (*Liquefied Natural Gas*) karena dinilai lebih fleksibel untuk wilayah yang belum terjangkau pipa.

“Karena sebenarnya konsep Indonesia bagian timur belum terlayani semuanya. Sebetulnya kalau kita bicara harga bisa dikompensasi dengan kesediaan. Kalau tersedia, mungkin harga bisa diakses oleh semua pihak. Jadi LNG itu juga jadi bagian dari kajian yang sudah kita lakukan termasuk CNG,” jelas Agung lebih lanjut.

Selain LNG, Pemerintah juga mengkaji pemanfaatan CNG sebagai solusi distribusi melalui skema stasiun pengisian CNG. Skema yang dikembangkan adalah membangun stasiun CNG, kemudian gas didistribusikan ke wilayah tertentu dan dilanjutkan dengan jaringan pipa skala kota (*city gas*). Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas akses energi secara lebih efisien dan menjangkau daerah yang belum terhubung jaringan pipa besar.

“Kita bagaimana membangun suatu stasiun pengisian CNG, kemudian CNG itu kita bawa ke suatu wilayah. Jadi kita bikin jaringan pipa seperti City Gas,” jelasnya. ●

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Hilir Migas Pasca Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026



Oleh: Naufal Noor Rochman

Izin adalah Janji kepada Publik
Bayangkan sebuah terminal BBM tetap beroperasi setelah tangki, pipa, atau kapasitasnya berubah, tetapi data perizinannya tidak pernah diperbarui. Bagi badan usaha, izin mungkin tampak sebagai dokumen pembuka kegiatan bisnis. Namun, bagi pekerja dan warga sekitar, izin adalah janji bahwa fasilitas tersebut aman, produknya bermutu, dan operasinya dapat dipertanggungjawabkan.



Karena itu, perizinan hilir migas tidak boleh berhenti pada terbitnya Nomor Induk Berusaha atau persetujuan di layar OSS. Izin harus menjelaskan pelaku, kegiatan, lokasi, fasilitas, produk, standar, serta risiko yang wajib dikendalikan.

Dari Dokumen Menuju Risiko Nyata

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau PBBR berangkat dari kenyataan bahwa setiap kegiatan tidak menimbulkan konsekuensi yang sama. PP Nomor 28 Tahun 2025 membagi kegiatan ke dalam risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. NIB berfungsi sebagai identitas berusaha. Pada risiko menengah rendah, sertifikat standar diterbitkan berdasarkan pernyataan mandiri dan pemenuhannya diperiksa melalui pengawasan. Pada risiko menengah tinggi, pemenuhan standar harus diverifikasi sebelum kegiatan operasional, sedangkan kegiatan berisiko tinggi memerlukan izin (Pemerintah RI, 2025).

Kegiatan utama hilir migas pengolahan, pengangkutan melalui pipa, penyimpanan, dan niaga ditempatkan sebagai kegiatan berisiko tinggi. Kegagalannya dapat berdampak pada keselamatan, lingkungan, mutu bahan bakar, pasokan, dan konsumen. PBBR semestinya menggeser perhatian pemerintah dari kelengkapan berkas menuju kepatuhan aktual dan besarnya dampak. Penyederhanaan proses tidak mengurangi tanggung jawab, tetapi memberi ruang untuk memusatkan pengawasan pada risiko terbesar (Kementerian ESDM, 2026).

Apa yang Berubah Setelah Permen ESDM 7/2026

Dalam arsitektur nasional, UU Nomor 6 Tahun 2023 menjadi payung reformasi Cipta Kerja, PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur sistem PBBR,

sedangkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026 menerjemahkannya menjadi standar teknis sektor ESDM. Permen tersebut ditetapkan pada 8 Juni 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Juni 2026. Peraturan ini juga mencabut Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 (Pemerintah RI, 2023; Kementerian ESDM, 2026). Lampirannya menghubungkan ruang lingkup kegiatan, KBLI, skala usaha, tingkat risiko, persyaratan, verifikasi, masa berlaku, kewajiban, dan pengawasan. Perizinan diproses melalui OSS yang terintegrasi dengan sistem INLINE Kementerian ESDM (Kementerian ESDM, 2026).

Masa Berlaku Bukan Masa Bebas

Masa berlaku izin hilir tidak seragam. Izin niaga BBM, misalnya, berbeda menurut kapasitas penyimpanan. Izin lainnya dapat mengikuti kontrak pasokan, alokasi gas, atau karakter fasilitas. Karena itu, ungkapan “izin berlaku selamanya” tidak tepat. Selama izin berlaku, badan usaha tetap wajib memenuhi standar, menyampaikan laporan, menjaga keselamatan dan mutu, serta menyesuaikan izin apabila data administratif atau teknis berubah (Kementerian ESDM, 2026).

Izin lama yang masih berlaku tetap diakui sampai jangka waktunya berakhir. Permohonan yang sedang diproses sebelum OSS disesuaikan tetap mengikuti perizinan yang telah ditetapkan sebelumnya. Izin dapat tetap berlaku, tetapi kepatuhan harus terus dibuktikan oleh pelaku usaha (Kementerian ESDM, 2026).

Blending dan Kondensat: Kejelasan yang Dibutuhkan Selama Ini

Permen ini memperjelas pencampuran produk kilang dengan bahan bakar nabati melalui KBLI 19206. Kegiatan tersebut berisiko menengah tinggi dan hanya dapat

dilakukan oleh pemegang izin pengolahan, penyimpanan, atau niaga yang masih berlaku. Khusus pelaku usaha yang melakukan kegiatan pencampuran (*biofuel*) yang telah memiliki izin pengolahan, penyimpanan, atau niaga, dalam jangka waktu 12 bulan sejak peraturan ini diundangkan, wajib mengajukan permohonan baru yaitu KBLI 19206.

Pelaku usaha yang melakukan *blending*, harus memiliki SOP yang menyebutkan komoditas dan lokasi, sedangkan masa persetujuannya mengikuti izin usaha yang mendasarinya. Pengujian mutu melalui fasilitas sendiri atau laboratorium independen terakreditasi yang menegaskan bahwa *blending* bukan sekadar mencampur, tetapi proses untuk menghasilkan produk akhir sesuai standar keselamatan dan kualitas (Kementerian ESDM, 2026).

Kondensat didefinisikan sebagai fraksi hidrokarbon cair yang mengembun pada kondisi permukaan setelah dipisahkan dari gas bumi. Dalam ruang lingkup niaga KBLI 46610, kondensat dari kegiatan eksploitasi diperlakukan sebagai minyak bumi. Ketentuan ini tidak menghapus asal kondensat dari kegiatan hulu, tetapi memperjelas legalitasnya ketika memasuki pengolahan atau niaga hilir. Pedoman teknis tetap diperlukan agar pencatatan volume, mutu, asal pasokan, dan pembagian kewenangan tidak tumpang tindih (Kementerian ESDM, 2026).

Pengawasan yang Lebih Tajam

Pengawasan berbasis risiko bukan berarti pengawasan dikurangi. Dokumen, laporan, inspeksi, pengujian mutu, kondisi fasilitas, pengaduan, dan riwayat insiden harus digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan. OECD

menegaskan bahwa frekuensi inspeksi dan sumber daya pengawasan perlu sebanding dengan tingkat risiko, sedangkan tindakan penegakan harus diarahkan untuk mengurangi risiko nyata (OECD, 2018).

Badan usaha dengan perubahan fasilitas, laporan tidak konsisten, keluhan masyarakat, temuan mutu, atau insiden perlu mendapat prioritas pengawasan. Respons pemerintah juga harus bertahap: pembinaan untuk kekeliruan yang dapat

diperbaiki, pengawasan intensif bagi pelanggaran berulang, dan sanksi tegas ketika kepentingan publik terancam. Permen ini menyediakan rentang sanksi administratif dari peringatan tertulis, penghentian sementara, denda administratif, hingga pencabutan izin. Penerapannya harus konsisten dan proporsional (Kementerian ESDM, 2026; OECD, 2018).

Agar Regulasi Bekerja di Lapangan Ditjen Migas bersama lembaga OSS perlu menerbitkan matriks

resmi kegiatan, KBLI, tingkat risiko, bentuk izin, dan perubahan yang wajib dilaporkan oleh pelaku usaha. Kementerian ESDM, BPH Migas, serta pemerintah daerah perlu menyepakati pembagian peran, pertukaran data, dan pola pengawasan dan pemeriksaan. Profil risiko setiap badan usaha perlu dibangun dari legalitas, kapasitas, produk, laporan, pengaduan, temuan mutu, dan insiden.

Sosialisasi juga tidak cukup berupa seminar. Pelaku usaha dan aparatur pemerintah membutuhkan pedoman, contoh kasus, FAQ resmi, klinik konsultasi, serta kanal komunikasi untuk memperoleh penafsiran yang konsisten. Keberhasilan regulasi tidak cukup diukur dari jumlah izin atau kecepatan penerbitannya, tetapi dari berkurangnya ketidaksesuaian, meningkatnya pembaruan data dan kepatuhan, semakin tepatnya sasaran inspeksi, serta terjaganya keselamatan, mutu, lingkungan, dan kepercayaan masyarakat.

Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026 menyediakan fondasi yang lebih proporsional. Namun, regulasi hanya efektif ketika aturan jelas, pelaku usaha bertanggung jawab, dan pemerintah mengawasi berdasarkan data yang benar. Izin membuka peluang investasi, sedangkan kepatuhan menjaga agar peluang tersebut tidak dibayar dengan risiko bagi publik. ●



Ilustrasi

Daftar Sumber

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2021. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2026. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- OECD. 2018. OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit. OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



Pengelolaan Bahan Peledak Migas yang Andal dan Aman melalui Persetujuan Gudang dan Juru Tembak



Oleh: Asti Murdaningsih dan Ihda Nur Muhtada

Bahan peledak merupakan material berisiko tinggi yang penggunaannya harus dikendalikan secara ketat. Pada industri minyak dan gas bumi, bahan peledak digunakan untuk mendukung pekerjaan perforasi, operasi sumur, dan seismik.

Pengelolaan bahan peledak yang andal dan aman perlu dilakukan karena risiko yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut potensi kecelakaan kerja, tetapi juga dapat berdampak pada gangguan operasi, kerusakan aset, ancaman terhadap lingkungan, hingga risiko keamanan yang lebih luas. Kesalahan dalam penyimpanan, pengangkutan, pengeluaran, maupun penggunaan bahan peledak dapat memicu insiden serius yang berakibat fatal. Oleh karena itu, pengendalian terhadap bahan peledak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian penting dari upaya membangun operasi migas yang selamat dan berkelanjutan.

Pengelolaan bahan peledak harus menjamin bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan secara sistematis, mulai dari kesiapan fasilitas penyimpanan, kecukupan prosedur operasional, kompetensi personel, hingga mekanisme pelaporan dan pengawasan. Sistem yang andal akan memastikan bahwa hanya fasilitas yang layak yang dapat digunakan untuk menyimpan bahan peledak, dan hanya personel yang kompeten serta memperoleh persetujuan yang dapat menangani penggunaannya di lapangan.



Gambar 1. Gudang Bahan Peledak

Dalam rangka memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menerbitkan dua produk utama dalam pengelolaan bahan peledak subsektor migas, yaitu Persetujuan Gudang Bahan Peledak dan Persetujuan Juru Tembak.

Persetujuan Gudang Bahan Peledak dan Persetujuan Juru Tembak pada subsektor migas mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Secara umum, persyaratan teknis untuk gudang permanen maupun

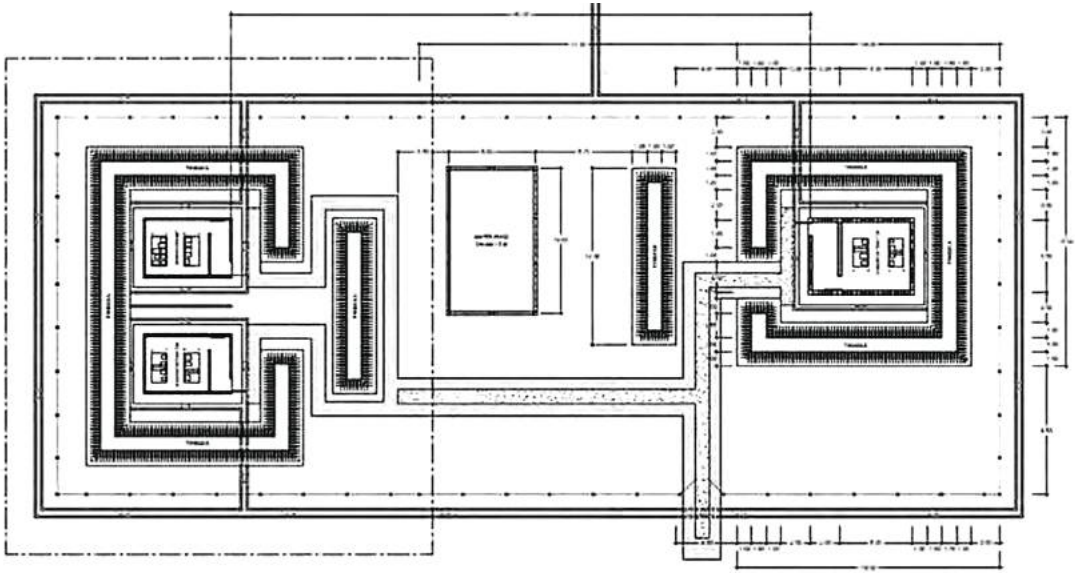
sementara meliputi:

- a. Gambar konstruksi Gudang Bahan Peledak;
- b. Layout Gudang Bahan Peledak;
- c. Peta Situasi yang menggambarkan posisi dan jarak gudang dengan sarana dan fasilitas di sekitarnya;
- d. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda untuk Gudang Permanen dan Gudang sementara di darat. Untuk Kontainer penyimpanan bahan peledak sementara di atas perairan tidak memerlukan rekomendasi Polda);
- e. Struktur Organisasi Tim Pengelola Bahan Peledak;
- f. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Bahan Peledak;
- g. Berita Acara Inspeksi Lapangan/ Verifikasi Dokumen Teknis oleh Inspektur Migas;
- h. Untuk gudang sementara pemakaian bersama atau sewa dilengkapi dengan perjanjian kerja sama atau sewa antara pemilik gudang dan pemakai gudang.

- i. pengelolaan harus memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia mengenai penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu.

Pengelolaan bahan peledak juga memuat kewajiban yang jelas bagi Kepala Teknik. Kepala Teknik bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak serta bahan peledak yang disimpan. Kepala Teknik juga berkewajiban menunjuk tim pengelola bahan peledak yang dilengkapi personel dengan sertifikat kualifikasi pengelola bahan peledak dan/atau juru tembak yang memiliki Surat Persetujuan Juru Tembak Bahan Peledak dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Persetujuan Juru Tembak merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan



Gambar 2. Layout Gudang Bahan Peledak

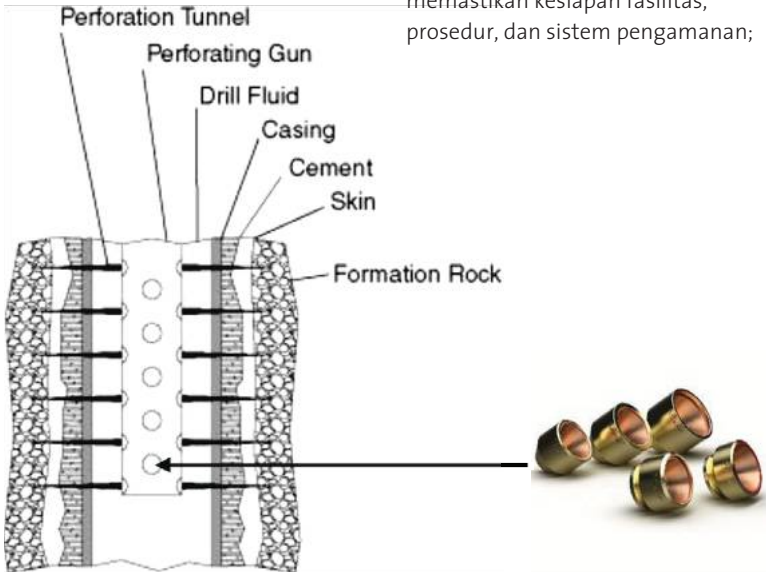
- bahan peledak hanya dilakukan oleh personel yang kompeten, sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Juru Tembak (SPTJB) meliputi:
- a. surat permohonan yang ditandatangani Kepala Teknik atau pimpinan tertinggi perusahaan;
 - b. curriculum vitae;
 - c. identitas diri;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

- e. sertifikat kualifikasi dan kompetensi juru tembak yang masih berlaku;
- f. surat penugasan sebagai juru tembak dari Kepala Teknik Migas atau pimpinan perusahaan penunjang;
- g. surat pernyataan sebagai juru tembak dari pimpinan perusahaan.

Keberadaan dua produk persetujuan tersebut mencerminkan pendekatan pengawasan yang menyeluruh. Persetujuan Gudang Bahan Peledak memastikan kesiapan fasilitas, prosedur, dan sistem pengamanan;

sedangkan Persetujuan Juru Tembak memastikan kesiapan personel yang akan menangani bahan peledak secara langsung. Dengan kata lain, keselamatan pengelolaan bahan peledak dibangun melalui dua pilar utama, yaitu fasilitas yang layak dan personel yang kompeten. Keduanya harus berjalan beriringan agar pengendalian risiko benar-benar efektif.

Pada akhirnya, pengelolaan bahan peledak migas yang andal dan aman merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya operasi migas yang selamat dan berkelanjutan. Melalui penerbitan Persetujuan Gudang Bahan Peledak dan Persetujuan Juru Tembak, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa pengendalian bahan peledak harus dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten. Langkah ini bukan hanya mendukung kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga memperkuat budaya keselamatan dan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan usaha migas. ●



Gambar 3. Bahan Peledak *Shaped Charge* untuk Perforasi Sumur



Membuka Era Baru Migas Non Konvensional: Dari Pembuktian MNK Rokan Menuju Ekosistem dan Ketahanan Energi Nasional

Oleh: Muhammad Shafa Ucca Vania



Bagi investor dan pelaku usaha, regulasi yang jelas adalah pintu masuk. Namun bagi negara, regulasi adalah benteng dan alat untuk mengelola risiko. Berbeda dengan migas konvensional yang mengandalkan akumulasi hidrokarbon pada jebakan konvensional, perusahaan Migas Non Konvensional (MNK) berhadapan dengan kompleksitas geologi yang masif, teknologi tinggi (*high technology*), investasi berskala raksasa (*high cost*), serta risiko operasional yang signifikan (*high risk*).

Tanpa kerangka regulasi yang adaptif dan iklim investasi yang kompetitif, potensi geologi sebesar apa pun akan tetap terperangkap di bawah tanah. Oleh karena itu, akselerasi MNK di Indonesia tidak cukup didorong oleh optimisme potensi saja, melainkan perlu dikawal dengan kepastian *workflow*, penyesuaian fiskal yang akomodatif, dan keterlibatan aktif ekosistem global.

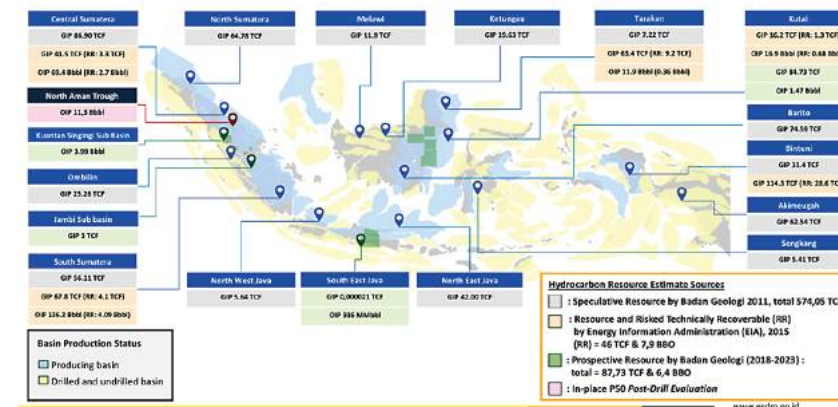
Menerjemahkan Potensi Menjadi Kepastian Geologi

Indonesia dikaruniai potensi sumber daya MNK yang signifikan. Kajian Energy Information Administration (EIA, 2015) pada lima cekungan utama menunjukkan sumber daya *in-place* mencapai 303 TCF gas dan 234 BBO minyak. Selain itu, Keberhasilan revolusi *shale oil* dan *shale gas* di Amerika Serikat pada 2018 menyumbang 70% produksi gas dan 60% produksi minyak nasionalnya hingga tidak lagi menjadikan Amerika Serikat sebagai *net importer* melainkan

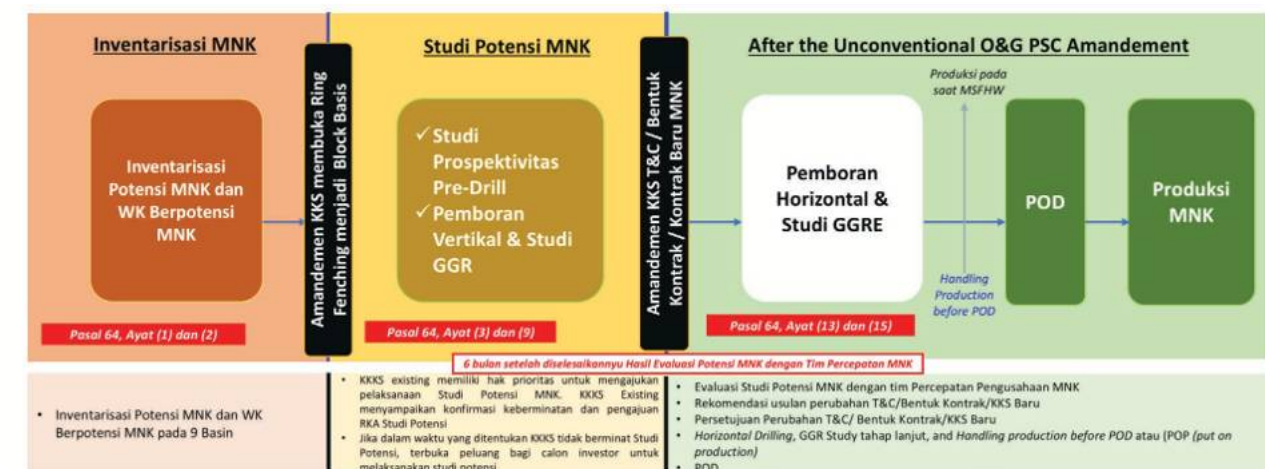
menjadi *net exporter*, hal ini menjadi bukti empiris bahwa keberhasilan komersialisasi MNK mampu mengubah peta energi negara secara drastis.

Meski demikian, angka potensi *in-place* memerlukan pembuktian berbasis data aktual. Untuk meningkatkan tingkat kepastian geologi, pemutakhiran neraca sumber daya MNK nasional ditempuh melalui dua pilar utama:

- 1. Penajaman Studi Regional:** Keberlanjutan studi oleh Pusat Survei Geologi (2018–2023) atas studi prospektif 2011 pada berbagai cekungan prospektif.
- 2. Evaluasi Pasca-Pemboran (Post-Drill) Studi Potensi MNK:** Integrasi data hasil pemboran sumur ke target MNK dan studi GGR mendalam yang memberikan pembuktian empiris mengenai karakter reservoir sebenarnya.



Gambar 1. Peta Potensi MNK Pasca Post-Drill North Aman Trough & Pemutakhiran Studi PSG



Gambar 2. Alur Pengusahaan MNK di WK Migas Existing

Secara Singkat Alur Pengusahaan MNK sebagai berikut:

- 1. Inventarisasi Potensi MNK:** SKK Migas atau BPMA melakukan inventarisasi potensi MNK pada WK konvensional *existing*, menetapkan WK yang terindikasi memiliki potensi, serta melaporkannya kepada Menteri ESDM.
- 2. Pengajuan Rencana Kerja:** KKKS *existing* yang berminat dapat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Studi Potensi MNK untuk memperoleh persetujuan SKK Migas/BPMA.
Catatan: Apabila KKKS *existing* tidak mengajukan RKA Studi Potensi sejak dilaporkan ke Menteri dan terdapat BU dan/atau BUT yang berminat, SKK Migas/BPMA dapat mengusulkan pengembalian sebagian WK (*relinquishment*) tersebut untuk ditawarkan kembali secara terbuka.
- 3. Monitoring & Evaluasi Studi Potensi MNK:** KKKS melaksanakan studi potensi MNK yang meliputi studi prospektivitas *pre-drill* serta pemboran vertikal & studi GGS. Pelaksanaan studi potensi MNK melibatkan Tim Percepatan Pengusahaan MNK (terdiri dari unsur Ditjen Migas, SKK Migas/BPMA, serta ahli perguruan tinggi) untuk mengevaluasi dan memberikan masukan bagi proses studi. Selanjutnya Tim Percepatan Pengusahaan MNK

atau BUT yang berminat, SKK Migas/BPMA dapat mengusulkan pengembalian sebagian WK (*relinquishment*) tersebut untuk ditawarkan kembali secara terbuka.

menyampaikan hasil evaluasi studi kepada Menteri ESDM.

- 4. Usulan Pengusahaan MNK:** Berdasarkan Hasil Evaluasi Studi dengan Tim Percepatan Pengusahaan MNK, apabila WK tersebut dinilai dan terbukti layak secara teknis dan keekonomian untuk diusahakan, KKKS dapat menyampaikan usulan pengusahaan MNK melalui:
 - Perubahan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama (KKS) *existing*;
 - Perubahan bentuk KKS; atau
 - Penandatanganan KKS Baru dengan Badan Usaha (BU) / Bentuk Usaha Tetap (BUT) terpisah.

Ketentuan Tambahan: Jika hasil evaluasi studi dinyatakan layak namun KKKS *existing* tidak mengajukan usulan pengusahaan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, SKK Migas/BPMA dapat mengusulkan pengembalian sebagian WK untuk selanjutnya dapat ditawarkan melalui Kontrak Kerja Sama Baru.

Selain itu Permen ESDM 35/2021 memberikan fleksibilitas bagi KKKS Konvensional *existing* untuk melakukan Studi Potensi MNK serta bermitra dengan pihak lain di dalam area blok.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto menambahkan bahwa eksplorasi termasuk migas non konvensional merupakan salah satu strategi peningkatan produksi migas di Indonesia. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan studi potensi Migas Non Konvensional (MNK) di Wilayah Kerja (WK) Eksisting, studi tersebut dimonitor secara berkala oleh Tim Percepatan Pengusahaan MNK. Diharapkan

keberhasilan MNK Rokan dapat memacu kegiatan studi potensi MNK lainnya serta dapat membuka potensi kolaborasi strategis antara KKKS dan calon investor untuk melakukan studi MNK pada WK Eksisting yang teridentifikasi berpotensi MNK maupun area prospektif.

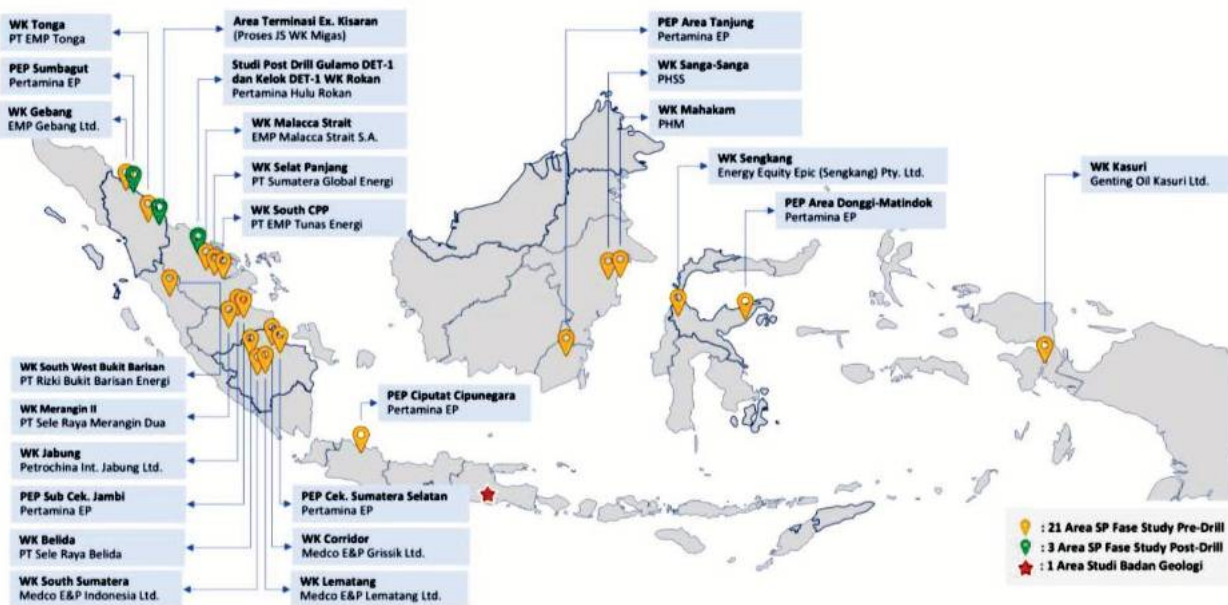
Kolaborasi SKK Migas dan ITB (2022–2026) berhasil mengidentifikasi 50 area yang memiliki potensi MNK, dan 24 WK *existing* di antaranya berminat melakukan studi potensi MNK. WK Rokan merupakan 1 dari WK *Existing* yang berminat melakukan studi dan menjadi pionir dengan rekam jejak pembuktian progresif:

- **Tahap Inisiasi & studi pre-drill (2021–2022):** MoU PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan EOGI Resources Indonesia (EOGI) untuk melaksanakan studi potensi MNK pada formasi *Pematang Brownshale di North Aman Trough (Central Sumatra Basin)*. Tahun 2022 PHR secara resmi menyampaikan surat keberminatan pelaksanaan studi potensi MNK di WK Rokan

dan melakukan studi *pre-drill* dengan ruang lingkup meliputi studi stratigrafi, basin modeling, petrofisika, geomekanika, dan simulasi desain *hydraulic fracturing*.

- **Tahap Tajak Sumur Vertikal & Akuisisi Data (2023–2024):** Pemboran dua sumur dalam kerangka KKP, yaitu Sumur Gulamo DET-1 (tajak 27 Juli 2023) dan Sumur Kelok DET-1 (tajak 14 Februari 2024).
- **Uji Alir & Pembuktian Temuan (2025–2026):** Hasil *hydraulic fracturing* terbatas Sumur Gulamo DET-1 menghasilkan laju alir minyak ~59 hingga 500 BOPD. Evaluasi *post-drill* mengonfirmasi *giant discovery* dengan Volume *In-Place* (P50) sebesar 11,3 BBO dan *Recoverable Resources* (2C, P50) ±724 MMBOE, hasil studi tersebut telah disampaikan kepada Tim Percepatan Pengusahaan MNK (Februari 2026).

PHR telah menyampaikan usulan pengusahaan MNK Rokan kepada Pemerintah, tahap Rencana pengembangan MNK Rokan telah diusulkan dalam 3 tahap utama yaitu pemboran sumur appraisal



Gambar 3. Studi Potensi Migas Non Konvensional di Indonesia



Gambar 4. Peresmian Tajak Sumur Gulamo

(2026–2027), pemboran sumur *demonstration* memanfaatkan teknologi *Horizontal Well* dan *Multi-Stage Hydraulic Fracturing* (2027–2028), dan fase masif *development* pada tahun ~ 2029 dengan *peak production*) yang diproyeksikan mencapai 39.000 BOPD.

Penyesuaian Insentif Fiskal: Menjamin Keekonomian Proyek

Pengusahaan MNK perlu didukung dengan skema keekonomian yang mampu menutupi risiko investasi. Pemerintah merespons kebutuhan ini melalui dua instrumen fiskal:

- **Permen ESDM No. 13 Tahun 2024 (Gross Split):** Memberikan kepastian Fixed Split sebelum pajak hingga 93% untuk minyak dan 95% untuk gas bagi Kontraktor, mengadopsi struktur keekonomian keberhasilan Eagle Ford Shale di AS.
- **Kepmen ESDM No. 246.K/2026:** Merupakan regulasi khusus percepatan MNK Rokan yang memberi ruang penetapan insentif fiskal yang berdasarkan kelayakan teknis dan keekonomian Studi Potensi MNK. Insentif dititikberatkan pada tingkat kelayakan teknis (*subsurface*), aspek keekonomian (NPV, IRR dst), profil risiko operasional lapangan serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara

melalui peningkatan investasi dan penciptaan efek berganda.

Penguatan Ekosistem Lokal dan Promosi Global

Pencapaian MNK Rokan menandai era baru hulu migas Indonesia, keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan sinergi ekosistem rantai pasok yang efisien serta perizinan yang terintegrasi

- **Penguatan Ekosistem & Rantai Pasok Domestik:** Pemerintah mendorong efisiensi biaya melalui standarisasi rantai pasok, penajakan teknologi pengeboran horizontal dan *hydraulic fracturing*, pemanfaatan pasir kuarsa lokal sebagai *proppant*, pengelolaan kebutuhan air untuk operasional *hydraulic fracturing*, serta integrasi akses logistik serta memperhatikan manajemen sosial lingkungan yang baik. Di sisi lain, diperlukan juga percepatan perizinan dengan penyelerasan bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait.
- **Inisiatif Penajakan Investor Global:** pencapaian dapat memperkuat daya saing investasi Indonesia di mata investor domestik maupun mancanegara. Sehingga dapat membuka peluang kolaborasi studi dan eksplorasi pada cekungan-cekungan sedimen lainnya untuk meng-unlock

potensi *giant discovery* MNK lainnya di Indonesia. Untuk menggaet modal dan teknologi mutakhir, Pemerintah aktif melakukan penjangkauan internasional pada forum ADIPEC 2025, *Roadshow Investor Engagement* di United Kingdom, serta *Roadshow Promosi Open Area* di Calgary.

- **One-on-One Meeting & Transfer Teknologi:** Diskusi intensif dilakukan bersama pemain industri global seperti Anton Oil, KUFPEC, Dragon Oil, dan Sharjah National Oil Corporation (SNOC). Selain itu, pembelajaran dari Petronas Canada dalam pengusahaan *shale gas* dan *liquids-rich shale* dimanfaatkan sebagai rujukan teknis untuk membuka peluang kerja sama *farm-in* dan studi.

Menjaga Ketahanan Energi Masa Depan

Pencapaian MNK Rokan dan penyempurnaan kerangka regulasi memberikan sinyal positif bahwa Indonesia siap memasuki era baru industri hulu migas. Pencapaian ini diharapkan dapat memacu KKKS pada wilayah kerja lainnya yang sedang melaksanakan studi untuk melakukan percepatan dan masuk ke fase lebih lanjut. Namun, keberlanjutan momentum ini menuntut konsistensi pelaksanaan aturan, kemudahan perizinan lintas sektor, serta pengawasan berbasis data yang akurat.

Dengan mengkombinasikan transparansi tata cara, insentif fiskal yang kompetitif, penguatan ekosistem lokal, dan kolaborasi investor global, Indonesia membangun fondasi yang kokoh demi mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional jangka panjang. ●

Dirjen Migas Lantik Sejumlah Pejabat Fungsional



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pelantikan tersebut digelar dalam beberapa kesempatan berbeda.

Pada hari Kamis (8/1/2026), Laode melantik 42 ASN. Dari jumlah itu, sebanyak 24 orang merupakan pejabat fungsional di lingkungan

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Pada kesempatan yang sama, Laode juga menyerahkan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) untuk masa kerja 10, 20, dan 30 pada tahun 2025 kepada 115 PNS di lingkungan Kementerian ESDM. Penghargaan SLKS merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang, kejujuran, kecakapan, disiplin ASN yang diberikan secara terpilih dan bukan

merupakan hak secara otomatis yang harus diberikan kepada setiap ASN.

Kemudian, pada Jumat (8/5/2026), Laode melantik 56 pejabat fungsional ASN di lingkungan Kementerian ESDM, yang termasuk sembilan pejabat fungsional dari Ditjen Migas.

“Yang cepat akan lebih unggul dibandingkan hanya mengandalkan kecerdasan dan kepintaran. Hal ini



perlu menjadi catatan bersama, mengingat saat ini banyak produk regulasi yang terus mengalami perubahan. Karena itu, ke depan diperlukan ketelitian dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan agar tetap *comply* (patuh) terhadap seluruh ketentuan yang berlaku,” pesan Laode di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Lebih lanjut, Laode juga berpesan agar para pegawai tetap menjaga jiwa korsa dan kekompakan. Menurutnya, hanya dengan persatuan dan kebersamaan yang kuat, organisasi akan mampu berdiri teguh dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan maupun ancaman dari luar.

Selain mengucapkan selamat kepada para pejabat fungsional yang resmi dilantik, Laode berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi untuk mendukung kemajuan sektor energi nasional. ●





Ditjen Migas Peringati Bulan K3 Nasional Lewat Berbagai Kegiatan

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 dengan berbagai kegiatan.

Salah satunya adalah diskusi bersama PT Pertamina (Persero) beserta subholding hulu dan hilir migas, untuk memperkuat komitmen K3 di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Senin (19/1/2026). Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menyampaikan, “Sekali lagi saya sampaikan bapak-ibu sekalian bahwa keselamatan atau HSSE ini adalah *baseline* kita di sub sektor migas. Kita bisa memikirkan target-target lain yang kita capai ketika ini berada di dalam situasi yang terkendali dan berjalan dengan baik. Tapi manakala ini ada terganggu, maka kita akan terkendala juga untuk mencapai target-target yang lainnya”.

Laode mencatat bahwa di tahun 2025, Pertamina mengalami tujuh kejadian *fatality* di sektor hulu dan empat di sektor hilir migas. Kejadian-kejadian tersebut paling banyak disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga. Oleh karena itu, Laode berpesan agar Pertamina dapat melakukan reviu terhadap kejadian tersebut sekaligus memeriksa kembali ketentuan-

ketentuan yang mengatur kerja sama antara Pertamina dengan pihak ketiga.

“Hadirin sekalian, tema Bulan K3 Nasional tahun 2026 ini, yang juga menjadi napas forum kita hari ini adalah Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif,” imbuhnya.

Dijelaskan Laode, profesional menekankan bahwa pengelolaan HSSE harus berbasis kompetensi, standar praktik terbaik (*best practice*), dan integritas. Profesionalisme tercermin dari *leadership* yang kuat serta pengambilan keputusan berbasis data dan keberanian untuk mengatakan “tidak” pada praktik kerja yang tidak selamat.

Kemudian, andal berarti bahwa sistem HSSE termasuk di dalamnya keandalan instalasi dan peralatan harus tetap efektif dan konsisten dalam melindungi pekerja, Masyarakat umum dan kondisi lingkungan, baik dalam situasi normal maupun saat menghadapi keadaan darurat atau krisis yang dibangun melalui perencanaan matang dan evaluasi yang komprehensif.

Terakhir, kolaboratif artinya bahwa keselamatan merupakan tugas bersama dan peningkatan

kolaborasi para pihak antara pemerintah, manajemen Pertamina, dan para pekerja adalah kunci utama untuk berbagi praktik baik dan membangun kepercayaan.

Mengakhiri sambutannya, Laode berharap forum HSSE tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan memperbaiki sistem operasional migas yang aman, andal serta akrab lingkungan. Pihaknya juga berharap semua hal baik yang sudah tercapai di tahun 2025 dapat dipertahankan dan kejadian *fatality* di tahun 2025 dapat menjadi *lesson learned* di tahun 2026.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan penandatanganan Komitmen Keselamatan Migas oleh Dirjen Migas dan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad, diikuti para peserta Forum HSSE.

Pada kesempatan ini, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (Dirtekling Migas) Kementerian ESDM sekaligus Kepala Inspeksi, Noor Arifin Muhammad menyoroti kejadian *fatality* pada kegiatan operasi hulu dan hilir migas sepanjang tahun 2025.

Di hadapan hadirin, Noor menyampaikan amanat *lesson learned* kinerja keselamatan migas tahun 2025 dan program keselamatan migas tahun 2026.

Pertama adalah meningkatkan kesadaran budaya keselamatan migas bagi seluruh personel perusahaan mulai dari manajemen puncak sambil dengan pekerja termasuk mitra kerja. Kedua, memastikan manajemen risiko (*job safety analysis* hingga mitigasi *bahaya*) dilakukan dan dipahami pekerja setiap sebelum mulai bekerja.

Ketiga, memastikan Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (CSMS) dijalankan dengan baik mulai dari tahapan pengadaan hingga

pelaksanaan pekerjaan. Keempat, menunjuk personel yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam inspeksi keselamatan pada kegiatan pemboran, untuk melakukan inspeksi keselamatan sebelum dilakukan pemboran.

Kelima, memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan mitra kerja diawasi oleh pengawas keselamatan yang berkompentensi. Keenam, seluruh kecelakaan wajib dilakukan investigasi untuk didapatkan akar masalah (*root cause*) dan disampaikan kepada seluruh pekerja di perusahaan sebagai *lesson learned*.

Terakhir, memastikan seluruh pekerja dan mitra kerja memahami *top ten risk* perusahaan (*tools & equipment, line of fire, hot work, ground disturbance work, working at height, water based activity, lifting operation, powered system, confined space, land transportation*).

Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 juga diisi dengan Webinar Bulan K3 Nasional Subsektor Migas Tahun

2026 pada hari Kamis (19/2/2026). Dalam kegiatan yang digelar secara kolaboratif antara Ditjen Migas dan Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Ketechnikan Migas Indonesia (PAKKEM) tersebut hadir pembicara dari regulator maupun profesional di bidang keselamatan dan ketechnikan migas di Indonesia.

Paparan pertama membahas tentang “Budaya Keselamatan Migas” yang disampaikan oleh Sub Koordinator Keselamatan Pekerja Hilir Migas sekaligus Inspektur Migas Madya, Onne Aswin Alamsyah. Adapun sesi paparan kedua disampaikan oleh CSMS & HSE Digitalization Support PT Medco E&P Indonesia, Amalia Rais Marson tentang “Contractor Safety Management System”.

Melalui kolaborasi regulator dan asosiasi profesi ini, diharapkan ekosistem pengelolaan K3 nasional semakin profesional, andal, dan kolaboratif, serta mampu menekan angka kecelakaan di tahun 2026. ●



RDMP Balikpapan Dukung Swasembada Solar

Pengoperasian proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan mampu meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel minyak per hari. Peningkatan kapasitas ini turut mendukung swasembada solar dan menekan ketergantungan impor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno saat membuka acara Energy Outlook 2026 yang bertema *Exploring Indonesia's Energy Policy: Self-sufficient and Pro-people* di Jakarta, Kamis (5/2/2026), memaparkan bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi nasional, Kementerian ESDM menetapkan tiga pilar utama, yaitu kemandirian energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Kemandirian energi diarahkan melalui peningkatan kapasitas kilang guna mengurangi ketergantungan impor BBM, dengan target

penghentian impor solar dan avtur pada 2026 serta bensin pada 2028.

“Pada akhir tahun 2026, diharapkan tidak diperlukan lagi impor solar dengan adanya mandatori biodiesel dan telah beroperasinya peningkatan kapasitas kilang RDMP Balikpapan yang sudah diresmikan oleh bapak presiden dan telah terjadi surplus produksi solar di Indonesia,” pungkas Tri.

Proyek RDMP Balikpapan merupakan proyek ekspansi kilang, selain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas volume pengolahan minyak mentah Kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barel per hari, produksi hasil RDMP Balikpapan juga bertambah sebesar 8,24 juta kl/tahun yang terdiri atas gasoline bertambah sebesar 5,80 juta kl/tahun, diesel bertambah sebesar 1,80 juta kl/tahun, dan avtur 640 ribu kl/tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian

ESDM Laode Sulaeman saat menjadi pembicara sesi diskusi panel pada kesempatan yang sama juga mengungkapkan bahwa beroperasinya proyek raksasa RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting.

“Jadi nanti sudah disampaikan bahwa dengan beroperasinya RDMP, di tahun 2026 ini, Indonesia sudah tidak mengimpor, khususnya Solar CN48. Yang kedua, makna pentingnya sebenarnya kalau kita kaitkan dengan konteks kedaulatan energi, selain kita mampu menghasilkan produk yang nanti terpakai di dalam negeri dan kita tidak impor lagi, dalam konteks ketahanan energi, Pemerintah berencana nantinya ke depan kita hanya mengimpor *source crude oil*-nya saja, produknya nanti kita upayakan agar seluruhnya diproduksi di dalam negeri,” papar Laode.

Selain Solar, peningkatan kapasitas kilang ini juga berdampak masif pada ekonomi makro. Penurunan impor BBM diproyeksikan mencapai nilai Rp68 triliun per tahun, serta mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

Proyek RDMP Balikpapan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi negara antara lain seperti penurunan impor BBM, menyerap ribuan tenaga kerja konstruksi serta pada fase operasi, tingkat komponen dalam negeri yang mencapai lebih dari 35% serta peningkatan PDB Nasional hingga Rp514 triliun selama fase konstruksi. Melalui proyek strategis nasional seperti RDMP Balikpapan ini, menjadi salah satu langkah Pemerintah tidak hanya untuk memastikan ketersediaan energi yang lebih terjangkau tetapi juga memberikan manfaat energi yang berkeadilan bagi masyarakat. ●



Ditjen Migas Akan Nilai Penerapan SMK

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) Tahun 2026. Penilaian ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan keselamatan pada kegiatan usaha migas.

Penilaian penerapan SMKM merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa perusahaan migas telah memiliki sistem manajemen serta dijalankan secara konsisten di seluruh kegiatan usaha migas.

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Migas, Noor Arifin Muhammad menegaskan, seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diwajibkan menerapkan SMKM.

“Penilaian penerapan SMKM ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kinerja keselamatan migas secara berkelanjutan serta menilai risiko kecelakaan migas dan *unplanned shutdown* yang dapat terjadi pada wilayah kerja atau izin usaha di sektor minyak dan gas bumi,” ujar Noor Arifin di kantornya, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Pelaksanaan penilaian tersebut merupakan amanat Keputusan Menteri ESDM Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 44.K/MG.06/DMT/2025 tentang Tata Cara Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas.

Tahapan pelaksanaannya, seluruh KKKS dan Badan Usaha Pemegang

Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan penilaian penerapan secara mandiri. Penilaian dilakukan dengan mengunduh Form Penilaian Penerapan SMKM melalui laman www.keselamatanmigas.id, kemudian mengisi dan mengunggah *form* tersebut beserta bukti serta tautan dokumen pendukung secara lengkap.

Noor menambahkan, hasil penilaian mandiri tersebut menjadi dasar pembinaan dan pengawasan keselamatan oleh Pemerintah.

“Kami mendorong seluruh KKKS dan Badan Usaha untuk melaksanakan penilaian ini secara objektif dan tepat waktu, karena hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dan arah pembinaan keselamatan migas ke depan,” katanya.

Sesuai ketentuan, hasil penilaian mandiri penerapan SMKM wajib disampaikan kepada Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi paling lambat 1 Maret 2026. ●



Sambut Ramadhan, Dirjen Migas Ajak Pegawai Tetap Produktif dan Jaga Integritas

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman dan sejumlah pejabat fungsional dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menghadiri Tahrib Ramadhan 1447 H di Gedung Migas Ibnu Sutowo, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Kegiatan bertajuk “Ramadan Produktif: Bekerja dengan Hati, Beribadah dengan Prestasi,” tersebut tidak hanya menjadi momen silaturahmi, namun juga penguatan kebersamaan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas selama bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Laode mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum “*recharge*” spiritual dan penguatan integritas dalam bekerja.

“Sebagaimana *handphone* yang perlu di-charge, kita pun perlu di-charge. Ramadhan adalah momentum terbaik untuk memperkuat keimanan dan memperbarui semangat pengabdian,” ujarnya.

“Sektor ini adalah sektor yang mampu amanat besar konstitusi. Apa yang kita lakukan sesungguhnya memberikan manfaat bukan hanya dalam skala kecil, tetapi dalam skala besar bagi masyarakat,” Laode menambahkan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kinerja yang telah ditunjukkan selama hampir lima bulan masa kepemimpinan Laode sebagai Dirjen Migas. Dirinya berharap semangat, dedikasi, serta keikhlasan dalam bekerja terus dijaga.

Mengakhiri sambutannya, Laode mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447 H bagi umat muslim di lingkungan Ditjen Migas, sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas sebagai nilai pahala dan kebaikan.

Masih dalam suasana Ramadhan, Ditjen Migas menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama sebagai upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar pimpinan dan pegawai Ditjen Migas bertempat di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, (13/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pegawai Ditjen Migas, serta diisi dengan serangkaian acara, termasuk pembacaan ayat suci Alquran, penyerahan bingkisan Lebaran kepada para petugas keamanan dan petugas kebersihan

di lingkungan Ditjen Migas, dan tausiyah keagamaan.

Kemudian, Ditjen Migas juga menggelar acara Halal Bihalal pada hari Rabu (25/3/2026). Kegiatan tersebut merupakan ajang silaturahmi setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H, sekaligus memperkuat komitmen pimpinan dan pegawai dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam sambutannya, Laode Sulaeman menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H kepada seluruh jajarannya, serta mengajak pimpinan dan pegawai untuk menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum refleksi diri.

Lebih lanjut, Laode menekankan pentingnya menjaga semangat kerja, kekompakan, serta saling mengingatkan dalam menjalankan tugas terutama di tengah dinamika kondisi global yang turut mempengaruhi sektor energi.

“Saya mohon kepada kita semua untuk saling mengingatkan. Kita harus selalu kompak, dari pimpinan sampai ke level staf, karena saya tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan dan *support* dari bapak-ibu sekalian,” tandasnya. ●



Dorong Produktivitas, Ditjen Migas Bekali Pegawai Strategi Kelola Stres

Beban kerja sangat berkaitan dengan produktivitas seseorang di tempat kerjanya. Beban kerja berlebih bisa menimbulkan stres yang berdampak negatif. Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menggelar “Sosialisasi Kesehatan Mental dan Manajemen Stres” bagi seluruh pegawai di lingkungan Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pegawai dengan kemampuan mengelola tekanan di tengah tingginya dinamika kerja di sektor energi guna menjaga kinerja organisasi tetap maksimal. Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menekankan bahwa beban kerja yang berlebihan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mental pegawai.

“Beban kerja yang terlalu banyak tentu dapat mempengaruhi seseorang, bukan hanya fisik, namun mental juga dapat terpengaruh karena perasaan stres yang timbul akibat beban kerja yang dianggap terlalu berat. Perasaan stres berlebih tidak hanya menciptakan emosi negatif namun juga membuat tingkat produktivitas pegawai menjadi rendah dan

kesulitan untuk berkonsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan,” ujar Rizwi.

Rizwi menambahkan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang sehat.

“Organisasi perlu memperhatikan kondisi lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental pegawainya agar produktivitas tidak rendah dan konsentrasi tetap terjaga dalam menyelesaikan pekerjaan,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan Dr. dr. Petrin Redayani Lukman, Sp.KJ, Subsp.P.K.(K) dan Adriana Amalia, M.Psi., Psikolog, CHT sebagai narasumber. Pada sesi pertama, Petrin memaparkan materi bertema “Mengenali *Burnout*, Ansietas, dan Depresi di Tempat Kerja”.

Petrin menjelaskan bahwa stres merupakan reaksi alami tubuh, namun jika tidak dikelola (distres), dapat memicu masalah serius.

“*Burnout* adalah respons terhadap stres berkepanjangan di tempat kerja yang tidak dikelola secara baik sehingga menjadi kronik. Tiga ciri



utama *burnout* yang perlu diwaspadai yaitu kelelahan fisik dan emosional, sikap sinis atau negatif terhadap pekerjaan, serta penurunan kinerja. Ciri utama *burnout* meliputi kelelahan fisik dan emosional, munculnya sikap sinis atau negatif terhadap pekerjaan, serta penurunan efikasi diri atau merasa tidak kompeten,” jelas Petrin.

Pada sesi kedua, Adriana memaparkan materi bertema “Energi Terjaga, Kinerja Membara”. Adriana menjelaskan strategi praktis mengelola stres melalui pendekatan *coping stress*. Pihaknya juga menekankan pentingnya mengenali gaya *coping* masing-masing individu.

“Kuncinya adalah resiliensi. Kita harus mampu bangkit kembali dari tekanan dengan cara mengatur regulasi emosi dan menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional serta *personal*,” jelasnya. ●



Dukung Proyek Swasembada Energi, Ditjen Migas Raih Apresiasi



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai berperan aktif dalam upaya penyelesaian proyek untuk tercapainya swasembada energi nasional. Atas upaya tersebut, Ditjen Migas menerima penghargaan dari PT Kilang Pertamina Balikpapan pada Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menyampaikan, Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan merupakan langkah strategis menuju swasembada energi nasional. Ia mengungkapkan, perhatian Pemerintah terhadap proyek ini sangat besar, mengingat

peran strategisnya dalam meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas tinggi, khususnya solar CN48.

“Kita harus pastikan kilang ini sudah bisa melayani produk CN48 untuk semua keperluan di dalam negeri. Bagaimana kilang ini nanti setelah beroperasi bisa menjadi tonggak ketahanan energi kita sehingga kita tidak lagi mengimpor solar,” jelas Laode.

Selain itu, Laode juga menyoroti peningkatan kompleksitas kilang RDMP Balikpapan yang signifikan. Jika sebelumnya indeks kompleksitas berada pada kisaran 3, kini meningkat menjadi sekitar 8, mencerminkan kemampuan pengolahan yang jauh lebih maju. Selain menghasilkan BBM berkualitas tinggi, kilang ini juga telah terintegrasi dengan produksi petrokimia seperti propylene, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri nasional.

“Ini bukan sekadar peningkatan kapasitas, tetapi transformasi struktur industri hilir migas kita. Kompleksitasnya tinggi dan teknologinya maju. Ini patut menjadi kebanggaan nasional,” ungkap Laode bangga.

“Sekali lagi, saya ucapkan selamat untuk Kilang Pertamina Balikpapan dan untuk kita semua dan semoga ini bisa mengantarkan Indonesia memiliki ketahanan energi dan kedaulatan energi yang baik ke depannya,” Laode mengakhiri.

●

Perkuat Pengawasan Maritim Sektor Migas, Ditjen Migas Pererat Kerja Sama dengan TNI AL



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mempererat kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tentang Perbantuan Personel TNI AL dalam Penugasan di Lingkungan Ditjen Migas. Hal ini terungkap saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Strategis Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Kamis, (19/2/2026).

Penandatanganan PKS ini merupakan perpanjangan kerja sama yang telah terjalin lama antara Ditjen Migas

dan TNI AL dalam mendukung pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas), khususnya di wilayah lepas pantai (*offshore*), melalui Staf Khusus Urusan Maritim (Susmar) Migas.

Dalam sambutannya, Laode Sulaeman selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) menekankan bahwa Pemerintah saat ini tengah berupaya mengejar target produksi migas nasional, termasuk target produksi 1 juta barel minyak per hari. Dalam konteks tersebut, stabilitas dan keamanan kegiatan usaha migas di lepas pantai menjadi faktor penting yang harus dijaga.

“Ketahanan energi hari ini tidak hanya soal produksi, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan pengamanannya. Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur migas, termasuk melalui jalur laut, kerja sama yang kuat

dengan TNI Angkatan Laut menjadi kunci untuk memastikan setiap proyek strategis berjalan aman, efektif, dan berkelanjutan”, ujar Laode.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang Irwanto selaku Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Laut (Aspers Kasal) Laksda TNI menegaskan bahwa perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momentum untuk meningkatkan kualitas kolaborasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

PKS ini juga menegaskan komitmen yuridis formal dalam pelaksanaan penugasan personel TNI AL di jajaran Ditjen Migas yang selama ini telah berjalan. Implementasi kerja sama diharapkan semakin optimal serta memberikan manfaat bagi kedua institusi dan kepentingan nasional secara luas. ●



Ditjen Migas Respons Cepat Atasi Kelangkaan BBM dan LPG di Pontianak dan Tuban

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) bergerak cepat memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta *liquefied petroleum gas* (LPG) di Pontianak, Kalimantan Barat. Respons cepat ini berawal dari adanya laporan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pontianak, khususnya Kabupaten Sintang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman terjun langsung ke lapangan pada Selasa (17/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Laode menegaskan komitmen Pemerintah untuk memastikan pasokan energi tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar bagi masyarakat.

“Kami hadir langsung di Pontianak untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat. Kita harus memastikan masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang terbaik dan solusi yang cepat”, jelasnya.

Berdasarkan data kesiapan infrastruktur energi di Kalimantan Barat, pasokan BBM dan LPG didukung oleh berbagai fasilitas strategis, termasuk Integrated Terminal Pontianak, Fuel Terminal Sintang, Fuel Terminal Ketapang, serta jaringan distribusi yang mencakup 151 SPBU, 116 agen LPG Tabung 3 kilogram, dan 4.280 pangkalan LPG Tabung 3 kilogram. Total kapasitas penyimpanan BBM di regional Kalimantan mencapai sekitar 526.479 kiloliter dan kapasitas LPG sekitar 7.720 metrik ton, yang menjadi

penopang utama ketahanan pasokan energi di wilayah tersebut.

Meski demikian, Laode menjelaskan bahwa gangguan operasional, seperti tidak beroperasinya jobber di wilayah Sanggau dan kondisi pendangkalan alur Sungai Melawi turut memengaruhi kelancaran penyaluran BBM ke sejumlah daerah, khususnya di Sintang. Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen Migas bersama badan usaha terkait segera melakukan langkah mitigasi, antara lain dengan mengoptimalkan suplai dari Integrated Terminal Pontianak, mengoptimalkan sumber daya manusia, menambah armada mobil tangki dari wilayah lain, serta menambahkan empat titik peristirahatan untuk menjaga kesinambungan pasokan.

“Kami memastikan bahwa pasokan BBM dan LPG tetap tersedia, dan langkah-langkah mitigasi terus dilakukan untuk mempercepat distribusi ke wilayah terdampak. Kita perlu terus memperkuat koordinasi agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” tegasnya.

Selain itu, upaya percepatan distribusi juga dilakukan melalui optimalisasi armada mobil tangki yang tersedia, termasuk pemanfaatan armada *existing* dan penambahan armada *charter* guna memperkuat distribusi energi. Secara keseluruhan, wilayah Kalimantan didukung oleh sekitar 739 unit mobil tangki BBM dan 104 unit *skid tank* LPG yang siap melayani distribusi energi ke masyarakat dan sektor industri.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis pasokan BBM dan LPG Tabung 3 kilogram di Sintang dan wilayah Kalimantan Barat lainnya dapat segera kembali normal. Kehadiran langsung Pemerintah di

lapangan menjadi bukti komitmen dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Gerak cepat Ditjen Migas dalam menangani kondisi serupa juga terlihat di Tuban, Jawa Timur. Laode melaksanakan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan adanya kelangkaan LPG Tabung 3 kg di wilayah tersebut pada Sabtu (11/4/2026).

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Laode mengamati langsung proses pengisian LPG tabung 3 kg serta alur pendistribusiannya di SPBE PT Purbaya Bagelen Mandiri, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selain itu, Laode juga melakukan pengecekan berat tabung untuk memastikan ketepatan berat isi dan pengecekan kebocoran untuk memastikan kualitas dan keamanan tabung. Berdasarkan hasil pengecekan secara sampling,

diperoleh bahwa berat isi LPG tabung 3 kg telah memenuhi ketentuan dengan berat minimal mencapai 8,00 kg (3 kg berat isi gas di dalam tabung dan 5 kg sisanya berat tabung kosong) serta tidak adanya tabung LPG yang bocor.

“Kami melakukan sidak di sejumlah titik distribusi LPG Tabung 3 Kg, mulai dari hulu di SPBE, dan seluruh prosesnya berjalan lancar dengan kondisi pasokan yang aman. Ke depan, kami berharap kinerja yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan,” ujar Laode.

Pada saat kunjungan ke pangkalan, Laode juga memeriksa kondisi stok LPG tabung 3 kg, harga jual kepada masyarakat, serta pola distribusi dari agen ke pangkalan. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan LPG tabung 3 kg benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak terjadi hambatan distribusi di lapangan. ●



Ditjen Migas Tekankan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya pemahaman gratifikasi bagi pegawai. Pemahaman yang menyeluruh penting agar para pegawai tak terjerat hukum.

Hal ini tersaji dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Ditjen Migas pada Kamis, (5/3/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti tak hanya oleh para pejabat, namun juga pegawai di lingkungan Ditjen Migas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Muhammad Rizwi J.H. dalam sambutannya menekankan pentingnya acara sosialisasi tersebut

sebagai upaya penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagaimana amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM.

Rizwi menekankan bahwa pemahaman mengenai gratifikasi perlu terus diperkuat di kalangan pegawai, mengingat tugas dan fungsi Ditjen Migas yang berkaitan erat dengan pengelolaan sektor strategis energi nasional. Oleh karena itu, seluruh pejabat dan pegawai diharapkan dapat bekerja secara profesional tanpa menerima pemberian apapun dari pengguna layanan yang berhubungan dengan jabatan.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Rizwi berharap, para peserta dapat memperoleh pemahaman tentang gratifikasi, seperti apa dan juga bagaimana cara pengendalian yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia sekaligus mengimbau kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Migas, untuk berani melaporkan kepada pihak Inspektorat apabila berhadapan dengan adanya dugaan gratifikasi.

“Keberanian untuk melaporkan ini tentunya adalah merupakan wujud integritas tertinggi bapak-ibu sekalian. Jadi saya mengharapkan melalui sosialisasi ini, ada pemahaman bagi kita untuk mengenai batasan mana yang wajib lapor dan yang mana yang tidak wajib lapor jadi lebih jelas,” ujar Rizwi. ●



Pastikan Distribusi Lancar, Dirjen Migas Tinjau Distribusi LPG 3 kg di Jakarta

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengunjungi sejumlah tempat pada 3-4 April 2026. Kunjungan kerja ini guna memastikan penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 kg di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari tersebut, Laode mengamati langsung proses pengisian LPG tabung 3 kg di SPBE PT Sapta Arta Setia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat (3/4/2026) dan juga SPBE PT Pertamina Trading & Services Tanjung Priok, Jakarta Utara di hari berikutnya, Sabtu (4/4/2026). Peninjauan juga dilakukan dengan melakukan pengecekan berat tabung secara sampling untuk memastikan ketepatan berat isi. Berdasarkan hasil pengecekan diperoleh bahwa berat isi LPG tabung 3 kg telah memenuhi ketentuan, dengan berat minimal mencapai 3,00 kg.

“Kita pertama kunjungi SPBE untuk memastikan penyiapan LPG tabung

3 kg berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan keselamatan kerja yang baik, beratnya juga kita timbang dari dua hari ini, kemarin kami sudah ke Bekasi, hari ini kita ke Jakarta, semua proses distribusi terkendali baik dan lancar,” jelas Laode.

Selain itu, pascakebakaran di SPBE PT Indogas Andalan Kita di Kabupaten Bekasi pada 1 April 2026, maka direncanakan pengalihan pengiriman komoditas LPG tabung 3 kg dari SPPBE di sekitar kejadian kebakaran dimaksud guna menjaga keberlanjutan distribusi LPG

tabung 3 kg kepada masyarakat. Melalui langkah ini, Ditjen Migas Kementerian ESDM memastikan bahwa adanya kejadian kebakaran pada salah satu fasilitas operasional tidak menghambat distribusi LPG 3 tabung kg, khususnya di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Selain meninjau SPBE, Laode bersama dengan Pertamina Patra Niaga dan rombongan juga meninjau tiga pangkalan LPG guna memastikan kesesuaian harga, distribusi, serta penerapan aspek keselamatan. ●





Ditjen Migas Tampung Aspirasi Rancangan Aturan Wajib SNI dan SKKNI



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menampung aspirasi terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) ESDM tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sistem Jaminan Kuantitas. Hal ini tercermin dalam konsultasi publik yang berlangsung secara daring pada Rabu (15/4/2026).

Konsultasi publik ini merupakan upaya strategis Pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam operasional produksi migas hingga titik serah. Direktur Teknik dan Lingkungan

Migas Noor Arifin Muhammad dalam sambutannya saat membuka forum tersebut menyampaikan bahwa penyusunan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008 terkait pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Proses standarisasi ini telah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 30.K/HK.02/MEM/2021 sebagai pedoman awal. Melalui serangkaian tahapan, pedoman tersebut kemudian disepakati menjadi standar nasional dan disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan nomor SNI 9040:2021.

“Penerapan SNI Sistem Jaminan Kuantitas dimaksud perlu didukung

dengan kompetensi personel yang melakukan evaluasi dan penyajian data sesuai SNI 9040:2021, untuk itu dibentuk Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Profesional Sistem Jaminan Kuantitas (*Quantity Assurance*) melalui Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 103.K.KU.02/DJM/2021 dan pada bulan Desember 2021 melaksanakan Konvensi Nasional serta menyepakati Rancangan SKKNI Sistem Jaminan Kuantitas menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2022,” papar Noor.

“Ditjen Migas telah melakukan serangkaian pembahasan teknis dan penyesuaian sarana dalam rentang waktu tahun 2023 hingga awal 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa saat aturan ini diundangkan, implementasinya di seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” pungkas Noor.

Melalui forum konsultasi publik ini, Ditjen Migas berharap mendapatkan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan sebagai poin krusial dalam menyempurnakan rumusan akhir peraturan sebelum disetujui oleh Bapak Menteri ESDM. ●

Visi Hilir Indonesia 2045 Cakup Tiga Aspek Utama

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Visi Hilir Indonesia 2045. Visi ini mencakup tiga aspek utama.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Hendra Gunawan pada forum “Asian Downstream Summit Roadshow 2026,” Selasa (21/4/2026). Mewakili Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Laode Sulaeman dalam acara tersebut, Hendra menjabarkan, ketiga visi tersebut.

Pertama ungkapnya, penguatan daya saing sektor hilir dengan membangun industri energi hilir kelas dunia dengan kemampuan pengolahan kuat dan nilai tambah tinggi. Kedua, peningkatan keamanan energi dengan memastikan pasokan energi aman melalui diversifikasi dan cadangan strategis. Terakhir, Pemerintah juga mendorong peningkatan nilai ekonomi lewat pengolahan dalam negeri dan manufaktur berorientasi ekspor.

Dalam implementasinya, Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pengolahan melalui pembangunan kilang baru serta optimalisasi kilang *existing*. Di sektor gas bumi, Pemerintah juga memperluas jaringan infrastruktur pipa dan distribusi untuk meningkatkan akses energi. Selain itu, pembangunan cadangan energi strategis dan penguatan infrastruktur menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi.

“Melalui kegiatan GRR (*Grass Root Refinery*) dan RDMP (*Refinery Development Master Plan*) ini bukan hanya proyek konstruksi besar, tetapi strategi kunci untuk kedaulatan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan target pengembangan sektor hilir menuju tahun 2030, antara lain peningkatan kapasitas pengolahan, pembangunan cadangan bahan bakar strategis, penguatan jaringan infrastruktur gas, serta peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir dan kawasan industri terpadu. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah membuka peluang investasi di sektor hilir migas, termasuk proyek kilang dan petrokimia, infrastruktur gas, serta pengembangan biofuel dan bahan bakar terbarukan lainnya. Berbagai kebijakan telah disiapkan, seperti pemberian insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, dan kepastian regulasi.

“Kami terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar sektor hilir migas dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Hendra lebih lanjut,

Pengembangan sektor hilir dilaksanakan melalui peta jalan hingga 2045 yang terbagi dalam tiga fase, yakni ekspansi infrastruktur (2025–2030), integrasi industri (2030–2040), dan penguatan daya saing global (2040–2045). Dalam forum internasional tersebut, Hendra optimistis sektor hilir migas dapat menjadi pilar utama ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional.

“Indonesia menyambut baik kolaborasi Internasional untuk membangun sektor energi hilir yang tangguh dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memajukan pengelolaan lingkungan melalui Kerangka Kerja Kolaboratif, Pertukaran Pengetahuan, dan Kemakmuran Bersama. Bersama-sama, kita dapat mengubah sektor hilir Indonesia menjadi model keamanan energi dan keunggulan industri,” tutup Hendra. ●



Gandeng INKAI, Dojo Karate Ditjen Migas Resmi Berdiri

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) resmi membentuk Dojo Karate Ditjen Migas. Menggandeng Institute Karate-Do Indonesia (INKAI), pembentukan dojo ini berlangsung di GOR Bulu Tangkis Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Laode Sulaeman selaku Direktur Jenderal Migas sekaligus Ketua Dojo Karate Ditjen Migas menegaskan pentingnya pembentukan Dojo Karate di Ditjen Migas sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mental pegawai dalam mendukung tugas pengawalan ketahanan energi nasional.

“Pengawal ketahanan energi harus memiliki fisik yang prima dan mental yang kuat. Tantangan ke depan semakin kompleks sehingga menjadikan kesiapan fisik dan mental menjadi hal yang penting dalam menjalankan tugas dan amanah kita,” tegas Laode.

Laode juga menambahkan bahwa pembentukan Dojo Karate di Ditjen Migas juga ditujukan sebagai sarana pemersatu pegawai di Ditjen Migas tanpa memandang jabatan maupun status.



“Saya memandang perlu adanya satu media yang dapat mempertemukan para pimpinan dan jajaran untuk bersilaturahmi. Salah satu tujuan dibentuknya Dojo Karate Ditjen Migas ini adalah sebagai media silaturahmi seluruh pegawai Ditjen Migas tanpa melihat batasan-batasan yang ada. Hanya sabuk saja nantinya yang akan menjadi pembeda, bukan yang lainnya,” tambah Laode.

Pada kesempatan yang sama, Angga Abbiyudana Siregar selaku Wakil Ketua Umum INKAI DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Jenderal Dojo Karate Ditjen Migas menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan Ditjen Migas kepada INKAI.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada INKAI untuk dapat hadir dan berkontribusi dalam pembinaan fisik dan mental di lingkungan Ditjen Migas. Karate bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga membentuk disiplin, kekuatan, dan karakter,” ujar Angga.

Melalui pembentukan dojo ini, Ditjen Migas berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, tangguh, disiplin, dan solid, guna mendukung optimalisasi kinerja pegawai dalam mengawal ketahanan energi nasional. ●

Penguatan Regulasi dan Kolaborasi Dorong Pengembangan CCUS

Pengembangan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan terintegrasi, serta sinergi antarkementerian dan lembaga. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong kerangka regulasi sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi CCUS.

Direktur Pembinaan Program Migas yang diwakili oleh Pinta Uly Talytha Kумы selaku Koordinator Kerja Sama Migas menyampaikan hal tersebut dalam *Workshop on Legal & Regulatory Frameworks for Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) yang diselenggarakan oleh United States Department of Commerce's Commercial Law Development Program (CLDP) dan sebagai forum penguatan kebijakan dan kolaborasi pengembangan CCUS di Indonesia.

“Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang besar dan tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menjadi modal penting dalam pengembangan CCUS sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor energi,” jelas Pinta dalam acara tersebut belum lama ini.

Lebih lanjut, Pinta juga menekankan bahwa pemerintah terus mendorong kerangka regulasi sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi CCUS, termasuk melalui penyalarsan kebijakan lintas sektor dan pengembangan *roadmap* nasional.

“Pengembangan CCUS membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan terintegrasi, serta sinergi antar kementerian dan lembaga”

Hal ini penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Pinta.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Ditjen Migas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan teknologi rendah karbon sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. ●



Sosialisasi Konsep KSOT (Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi) Pengelolaan Kemitraan Struktur/Area Kepada Calon Mitra/Provider Teknologi di Lingkungan Subholding Upstream

Jakarta, 24 April 2026



Sinergi, Inovasi Teknologi dan HSSE Penting dalam Peningkatan Produksi Migas

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menilai penting sinergi dan inovasi teknologi antara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mitra swasta. Tak hanya itu, keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan atau *health, safety, security, and environment* (HSSE) juga menjadi elemen yang tak bisa dipinggirkan.

Sinergi, inovasi teknologi, dan HSSE merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka percepatan peningkatan produksi migas untuk menjawab tantangan defisit pasokan dan kebutuhan minyak bumi dan BBM, serta mengejar target swasembada energi nasional.

“Situasi geopolitik global saat ini menuntut kekompakan yang luar biasa. Dalam dua bulan terakhir kita terus memantau situasi. Kekompakan seluruh *stakeholder*, Pemerintah dan BUMN menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas energi kita,” papar Laode

saat membuka acara Sosialisasi Konsep Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi (KSOT) di lingkungan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Laode juga mengungkapkan bahwa meskipun produksi minyak nasional tahun 2025 berhasil melampaui target APBN, angka tersebut masih belum mencukupi kebutuhan domestik yang terus meningkat.

“Capaian ini menjadi momentum positif di tengah tren penurunan produksi dalam satu dekade terakhir. Namun, dengan realisasi di kisaran 600 ribu barel per hari, kita masih harus bekerja keras mengimbangi konsumsi nasional yang mencapai 1,5 juta barel per hari,” tambahnya.

Sejalan dengan upaya peningkatan produksi migas, Laode juga menekankan pentingnya pemenuhan standar HSSE. Pihaknya menganalogikan aspek keamanan dan keselamatan kerja sebagai fondasi utama dalam industri migas.

“Saya ingin sampaikan bahwa HSSE ini kalau dalam membangun rumah ibaratnya adalah baseline atau fondasi. Kalau fondasinya tidak kuat, maka rumah yang kita bangun itu akan rapuh. Saya juga ingin mengapresiasi Pertamina yang menjadikan ini prioritas dalam setiap upaya peningkatan *lifting*,” Laode menekankan.

Pemerintah berharap melalui sosialisasi ini Pertamina serta calon mitra atau provider teknologi yang nantinya akan bekerja sama dengan Pertamina dapat berkomitmen untuk melakukan upaya yang tepat dan cepat, baik secara teknis maupun finansial dalam implementasi KSOT.

“Semoga semua yang hadir pada hari ini bersama-sama dapat bersinergi dan berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan produksi untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan swasembada energi,” tutup Laode. ●

Ditjen Migas dan Kejagung Tanda Tangan Pakta Integritas Kawal Proyek Strategis Nasional

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatangani Pakta Integritas terhadap sejumlah proyek strategis di lingkungan Ditjen Migas. Penandatanganan ini berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Lebih jelasnya, penandatanganan ini merupakan bagian dari dukungan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMINTEL) terhadap proyek-proyek infrastruktur Migas yang krusial bagi ketahanan energi nasional.

Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan pipa transmisi gas ruas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) Segmen Belawan-Labuhan Batu dan Segmen Labuhan Batu-Duri sepanjang ±541,8 km serta lima paket pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) Tahun 2025 dengan total sebanyak 115.264 SR (Sambungan Rumah) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Agung Kuswardono yang hadir mewakili Direktur Jenderal Migas pada sambutannya dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya sinergi ini untuk memastikan proyek berjalan sesuai target tanpa kendala hukum atau birokrasi. Agung menyampaikan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bentuk komitmen pelaksanaan PPS untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proyek-proyek strategis di lingkungan Ditjen Migas. Dukungan dari Kejaksaan sangat penting untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkas Agung.

Agung menambahkan bahwa dengan pengawasan ketat dari sisi intelijen penegakan hukum ini, Ditjen Migas optimis proyek-proyek strategis nasional, seperti pipa transmisi gas

Dusem dan pembangunan ribuan sambungan rumah jargas dapat diselesaikan tepat waktu untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi ini diharapkan tidak hanya mempercepat target ketahanan energi nasional, tetapi juga menjamin bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efisien. Ditjen Migas juga terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) sekaligus mengakselerasi pembangunan infrastruktur energi yang efisien dan ramah lingkungan di seluruh pelosok negeri.

Proyek pipa transmisi gas bumi Dusem dan jargas ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi energi yang dilakukan Pemerintah dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi alternatif dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi melalui pasokan migas yang memadai serta dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. ●

Dorong Pengembangan Hulu Migas Papua, Ditjen Migas Tekankan Sinergi

Papua bisa menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional melalui pengembangan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang berkelanjutan. Kunci keberhasilan pembangunan Papua terletak pada sinergi antarpemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyampaikan hal tersebut pada agenda Executive Meeting Arah Pembangunan Daerah Penghasil Tambang (Pendidikan Pemuda Papua) di JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta, Jumat (8/5/2026).

“Kunci keberhasilan pembangunan itu berada di kekuatan sumber daya manusia di daerah maupun di pusat. Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan *benchmark* untuk ke depannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” papar Laode.

Pemerintah terus memacu produksi minyak bumi Papua yang saat ini berada di angka 14 MBOPD dan gas bumi sebesar 2.000 mmscf. Selain melalui pengembangan lapangan baru, Ditjen Migas juga mendorong reaktivasi sumur-sumur *idle* dan menggunakan teknologi seperti *fracking*, *enhanced oil recovery* (EOR), serta *horizontal drilling* untuk peningkatan produksi minyak di lapangan *existing*.

Kehadiran industri hulu migas ini dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Namun, fokus Pemerintah kini tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), kepemilikan *participating interest* (PI) 10%, serta

transformasi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Cendrawasih.

“Melalui mekanisme DBH dan PI 10%, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal. Potensi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga tentu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal,” pungkas Laode.

Industri migas juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua melalui penyerapan tenaga lokal. Pada proyek terbaru BP Tangguh yaitu UCC Ubadari, dari total sekitar 4.018 tenaga kerja pada fasilitas UCC, sebanyak 1.330 pekerja atau sekitar 33% merupakan tenaga kerja asal Papua, dan 929 tenaga kerja berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak. Data ini menunjukkan bahwa pengembangan industri migas di Papua juga harus berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas SDM lokal.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui PEM Akamigas, Pusdiklat Migas serta universitas untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi generasi muda Papua. ●

Pangkas Beban Subsidi LPG, Pemerintah Siapkan Roadmap Konversi ke CNG

Implementasi penggunaan *compressed natural gas* (CNG) dan *liquefied natural gas* (LNG) menjadi energi alternatif yang lebih murah bagi masyarakat dan pelaku usaha. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan *roadmap* konversi ke CNG.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman saat menjadi narasumber pada *talkshow and press conference* ASPEBINDO bertajuk “CNG dan LNG untuk Rakyat: Solusi Nyata Substitusi LPG dan Swasembada Energi Nasional” di kantor Energy Hub Epiwalk Kuningan, Jakarta, Selasa (5/5/2026), memaparkan bahwa langkah konversi ini mendesak untuk dilakukan mengingat tren konsumsi LPG yang terus meningkat sementara produksi dalam negeri cenderung menurun. Hal ini menyebabkan beban subsidi dan devisa negara untuk impor LPG semakin membengkak setiap tahunnya.

“LPG kita sejak tahun 2012 turun terus. Dalam bertahun-tahun, dengan pertumbuhan penduduk, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain,” ungkap Laode.

Strategi konversi LPG ke CNG atau LNG juga didukung oleh kondisi cadangan gas bumi nasional yang cenderung meningkat. Per 1 Januari 2025, total cadangan gas bumi Indonesia mencapai 55,85 tscf. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan alokasi gas untuk domestik, di mana pada tahun 2026 porsi domestik diproyeksikan jauh melampaui porsi ekspor.

“*Roadmap detail* (tahapan implementasi) sedang digodok dan akan diumumkan secara resmi oleh Menteri ESDM. Substitusi ini diprediksi mampu menghemat biaya energi hingga 30% dibandingkan LPG. Selain menguntungkan secara ekonomi bagi konsumen,

penggunaan gas bumi juga akan memperkuat kedaulatan energi nasional karena sumber gasnya tersedia melimpah di wilayah Indonesia,” papar Laode.

Laode melalui kesempatan tersebut juga menekankan dua poin krusial dalam implementasi kebijakan substitusi ini, yaitu terkait keselamatan (*safety*) dan kemudahan penggunaan bagi konsumen. Pihaknya menjamin bahwa sistem yang dikembangkan akan bersifat *plug and play* sehingga masyarakat tidak perlu mengganti peralatan kompor yang sudah ada.

“Poin yang paling penting yang harus disiapkan adalah aspek keselamatan. Yang kedua, dia menggunakan *valve* atau *converter* yang harus *plug and play* sehingga kompor tidak perlu diganti,” tegas Laode. ●



Gelar *Kick Off Meeting* RSNI 2026, Komitmen Nyata Dorong Standardisasi Hulu Hingga Hilir Migas

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen dalam memperkuat ekosistem industri migas dan ketahanan energi nasional melalui standardisasi yang komprehensif. Hal ini tercermin dari dihelatnya *Kick Off Meeting* Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Tahun 2026 dengan mengundang para *stakeholder* bidang migas di Hotel Aston Sentul Lake, Senin (25/5/2026).

Agenda *kick off meeting* diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2/ KEP/BSN/1/2026, dimana dalam keputusan tersebut terdapat RSNI yang merupakan lingkup dari Komtek 75-01 dan Komtek 75-02 dengan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sebagai sekretariat.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas yang diwakili oleh Koordinator Standarisasi Migas Yuki Haidir saat membuka agenda *kick off meeting* ini

menyampaikan apresiasinya kepada seluruh komite teknis dan pemangku kepentingan yang hadir. Pihaknya mengakui adanya penyesuaian jumlah RSNI yang dirumuskan pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya namun hal tersebut tidak mengurangi nilai strategis dan komprehensifnya materi yang dibahas, mulai dari hulu hingga hilir migas.

“Perumusan RSNI saat ini cukup komprehensif mulai dari sisi hulu migas hingga produk hilir migas. Pada sisi hulu migas terdapat pembahasan RSNI Material lumpur pemboran dan dari sisi hilir terdapat pembahasan Metode Uji Penentuan Kandungan Biohidrokarbon dalam campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Solar dengan Bahan Bakar Nabati (BBN). Selain itu, penyusunan RSNI di bidang standar dan mutu (spesifikasi) BBM juga diharapkan dapat memberikan standar ataupun metode uji yang mendukung produk BBM yang akan beredar di masyarakat, sehingga baik produsen maupun konsumen memiliki kepastian terkait spesifikasi BBM dan metode uji BBM yang akan digunakan,” papar Yuki.

Yuki melalui kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya mufakat kolektif dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan subsektor migas ini, mulai dari unsur Pemerintah terkait, pakar, akademisi, pelaku usaha, hingga konsumen, pihaknya sangat mengharapkan kontribusi pemikiran sesuai kapasitas masing-masing.

“Kami sangat mengharapkan para pihak dapat memberikan sumbangsih sesuai dengan kapasitas, pengetahuan maupun kelimuan yang dimiliki. Hal ini penting mengingat kesepakatan dari berbagai pihak dalam perumusan RSNI akan sangat mendukung keberhasilan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada kegiatan usaha migas di masa mendatang,” pungkas Yuki.

Kegiatan perumusan ini ditargetkan dapat berjalan lancar melalui tahapan-tahapan standarisasi berikutnya hingga menghasilkan dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia Tahap 3 (RSNI3) yang valid, aplikatif dan mampu menjadi instrumen akselerasi industrialisasi migas tanah air serta membawa dampak positif bagi upaya memperkuat ketahanan dan mencapai swasembada energi nasional. ●

Dirjen Migas Tekankan Sinergi Hadapi Tantangan Energi Global



Sektor energi global saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari isu keamanan energi, keterjangkauan, keberlanjutan, hingga ketidakpastian geopolitik yang saling berkaitan. Menurutnya, di tengah dinamika tersebut, industri minyak dan gas tetap memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, dan ketahanan energi nasional.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman mengungkapkan hal di atas saat membuka kegiatan *Technical Program* pada 50th IPA Convex 2026, hari Rabu (20/5/2026).

Bagi Indonesia, sambung Laode, menjaga kinerja sektor hulu migas tetap menjadi prioritas nasional, seiring dengan percepatan pengembangan energi terbarukan dan agenda transisi energi.

“Oleh karena itu, inovasi, efisiensi, dan kolaborasi menjadi lebih penting dari sebelumnya,” ujar Laode dihadapan anggota Indonesia Petroleum Association (IPA), akademisi, profesional, dan mahasiswa.

Ia menilai, *Technical Program* pada 50th IPA Convex 2026 menjadi forum yang sangat relevan dalam menjawab tantangan industri energi ke depan. Program tersebut

menghadirkan sekitar 150 presentasi lisan dalam enam sesi paralel, 50 presentasi poster, lokakarya inti dengan partisipasi internasional, serta sesi khusus yang membahas potensi eksplorasi dan pengelolaan lapangan migas *mature*.

Laode juga menegaskan bahwa kemampuan teknis merupakan salah satu fondasi utama untuk memperkuat daya saing sektor hulu migas Indonesia. Inovasi di bidang teknologi eksplorasi, *enhanced oil recovery* (EOR), digitalisasi, manajemen karbon, kecerdasan buatan, analisis bawah permukaan, hingga efisiensi operasional dinilai akan menentukan efektivitas industri dalam membuka potensi sumber daya tersisa dan mempertahankan produksi di lapangan yang telah matang.

Selain penguatan teknologi, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai standar baru industri energi. Menurutnya, tantangan energi saat ini terlalu kompleks untuk diselesaikan secara individual sehingga membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, penyedia teknologi, hingga generasi muda profesional.

Dalam kesempatan tersebut, Laode juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan profesional muda dalam *Technical Program* pada 50th IPA Convex 2026. Ia menilai masa

depan sektor energi Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan dalam menyiapkan generasi penerus insinyur, ahli geologi, peneliti, dan pemimpin energi yang adaptif, inovatif, serta memiliki daya saing global.

Lebih lanjut, Laode menegaskan bahwa transisi energi tidak seharusnya dipandang sebagai persaingan antara energi fosil dan energi terbarukan. Menurutnya, transisi energi harus ditempatkan sebagai langkah yang seimbang dan realistis menuju sistem energi yang lebih aman, berkelanjutan, dan tangguh.

“Forum seperti IPA Convex sangat penting, tidak hanya untuk membahas tantangan operasional saat ini, tetapi juga membentuk visi jangka panjang industri melalui inovasi, kemitraan, dan komitmen bersama,” katanya.

Menutup sambutannya, Laode menyampaikan apresiasi kepada seluruh Komite Program Teknis, pembicara, perusahaan, institusi, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap *Technical Program* pada 50th IPA Convex 2026 dapat menghasilkan wawasan baru, kolaborasi strategis, dan solusi inovatif bagi masa depan sektor energi Indonesia. ●



Total Komitmen Investasi USD43,5 Juta, Inilah Empat Pemenang Lelang Wilayah Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) kembali mengumumkan Pemenang Lelang Reguler untuk Wilayah Kerja (WK) Abar Anggursi, Arwana III, Tuah Tanah, dan Akimeugah II. Nilai investasi keempat WK ini sebesar USD43,5 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD900 ribu.

Pemenang lelang reguler untuk empat WK di atas diumumkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode

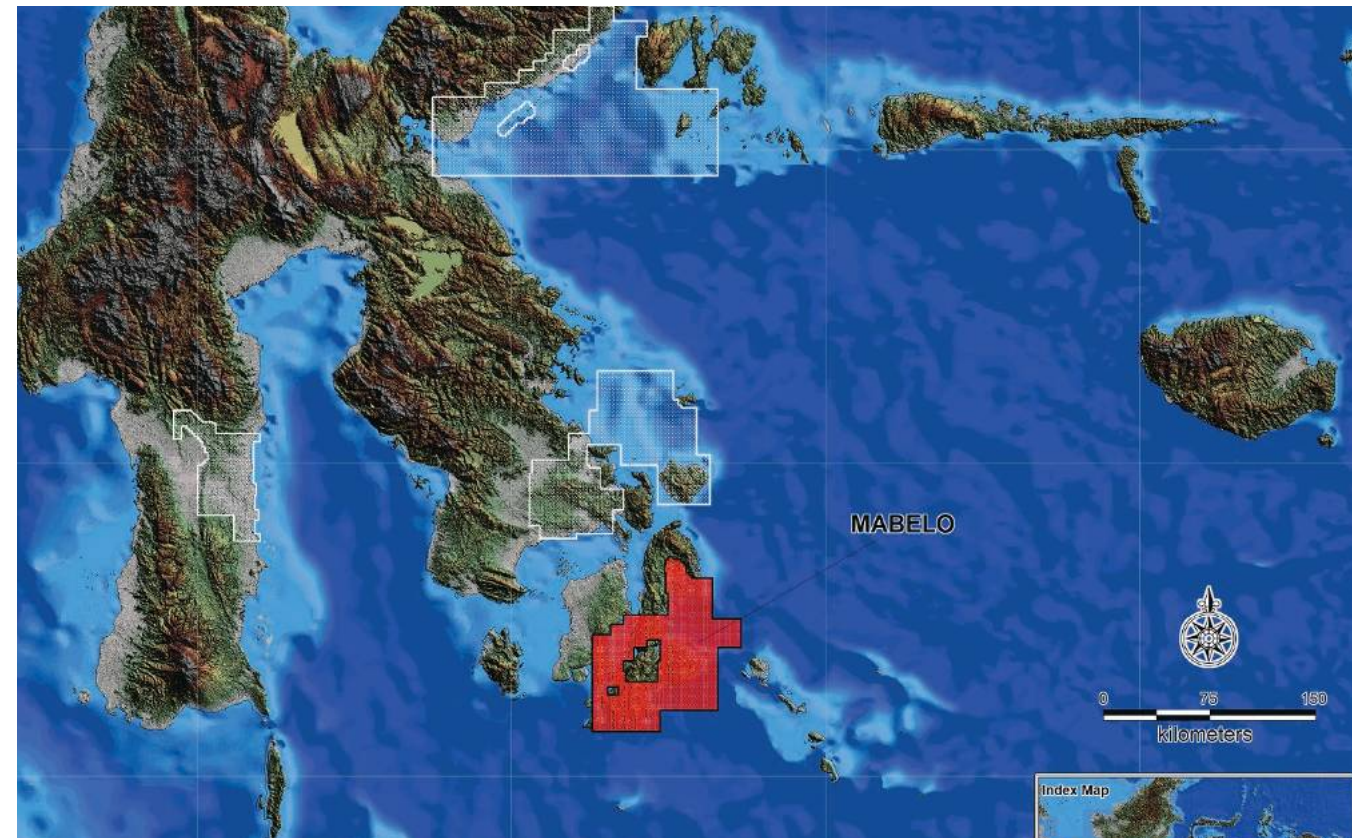
Sulaeman pada The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Rabu (20/5/2026).

“Hal ini membuktikan bahwa industri hulu Migas di Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor. Perbaikan regulasi yang telah dilakukan, termasuk perbaikan bagi hasil, insentif, maupun fasilitas perpajakan, telah terbukti mendukung dalam upaya

menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor hulu migas,” papar Laode.

Berdasarkan hasil penilaian atas Dokumen Partisipasi yang dilakukan Kementerian ESDM pada Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap II dan III Tahun 2025, Kementerian ESDM telah menetapkan Pemenang Lelang Penawaran Reguler Wilayah Kerja Migas sebagai berikut:

No.	Wilayah Kerja	Pemenang Lelang	Nilai Investasi	Bonus Tanda Tangan
1	Abar Anggursi	Cinda Energy (Hong Kong) Limited	USD2,35 juta	USD200 ribu
2	Arwana III	PT Prime Natuna Eksploitasi dan Produksi	USD7,7 juta	USD200 ribu
3	Tuah Tanah	PT Guna Tesuma Internasional	USD2,3 juta	USD300 ribu
4	Akimeugah II	PT Dongfang Exploration Oil	USD31,15 juta	USD200 ribu.



Mabelo Terbuka untuk Investor

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), resmi mengumumkan Wilayah Kerja (WK) Mabelo sebagai Wilayah Kerja Available. Pengumuman ini membuka kesempatan bagi para investor untuk mengusulkan pengelolaan wilayah kerja migas yang terletak di area strategis tersebut.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman memaparkan bahwa Pemerintah memiliki kebijakan, tanggung jawab dan kewajiban dalam penyediaan energi, dimana penggunaan energi Indonesia saat ini masih sangat tergantung kepada migas. Maka dari itu, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi saat ini merupakan basis dalam upaya Pemerintah untuk terus menemukan cadangan baru dan meningkatkan produksi guna menjaga ketersediaan

energi nasional di masa depan.

“Dalam rangka menjaga ketersediaan energi nasional di masa depan, Kementerian ESDM terus mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi sehingga diharapkan dapat diperoleh cadangan-cadangan baru,” pungkas Laode.

Detil wilayah kerja Mabelo sebagai berikut:

Wilayah Kerja	Luas (km²)	Bentuk Kontrak Bagi Hasil	Minimum Komitmen Pasti 3 Tahun Pertama	Minimum Bonus Tanda Tangan
Mabelo Berlokasi di Onshore dan Offshore Sulawesi Tenggara Perkiraan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi sekitar 282 MMSTB	7.334,24	Cost Recovery	- G & G - Acquisition & Processing 3D Seismic 250 km² or Acquisition & Processing 2D Seismic 500 km	USD200.000

Ini 9 Pemenang Lelang Wilayah Kerja Tahap II dan III Tahun 2025

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung Tahap II dan Tahap III Tahun 2025. Ada sembilan pemenang dengan nilai investasi total berupa komitmen pasti sebesar

USD84.750.000 dan bonus tanda tangan sebesar USD3.650.000. Pemenang sembilan wilayah kerja (WK) dimaksud ialah WK Bintuni, WK Karunia, WK Drawa, WK Jalu, WK Southwest Andaman, WK Barong, WK Delapan Muaro, WK Tapah, dan WK Nawasena.

Berdasarkan hasil penilaian atas Dokumen Partisipasi yang dilakukan Kementerian ESDM pada Lelang Penawaran Langsung Tahap II dan Tahap III Tahun 2025, Kementerian ESDM telah menetapkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas sebagai berikut:

No.	Wilayah Kerja	Pemenang Lelang	Komitmen Pasti
1	Bintuni	Konsorsium BP Exploration Indonesia Limited, MI Berau B.V., CNOOC Southeast Asia Limited, Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc.	USD16.550.000
2	Karunia	PT Sele Raya	USD9.900.000
3	Drawa	Konsorsium BP Exploration Indonesia Limited, MI Berau B.V., CNOOC Southeast Asia Limited, Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc.	USD6.450.000
4	Jalu	Armada Talu Holdings B.V.	USD6.600.000
5	Southwest Andaman	Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Limited	USD8.200.000
6	Barong	Konsorsium Inpex Corporation & BP Exploration Indonesia Limited	USD2.500.000
7	Delapan Muaro	PT Tenang Wijaya Sejahtera	USD1.500.000
8	Tapah	PT Goldenheaven Prima Investama	USD29.550.000
9	Nawasena	PT Medco Energi Linggau	USD3.500.000
Total Komitmen Pasti			USD84.750.000

Hal ini membuktikan bahwa industri hulu Migas di Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor. Perbaikan regulasi yang telah dilakukan, termasuk perbaikan bagi hasil, insentif, maupun fasilitas perpajakan, telah terbukti mendukung dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor hulu migas.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman memaparkan bahwa sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, agar dilakukan upaya percepatan eksplorasi dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan pada kesempatan ini terdapat 9 blok migas baru hasil lelang wilayah kerja migas tahun 2025 tahap II dan tahap III yang telah didapatkan pemenangnya.

“Dengan demikian, dari total sekitar 110 potensi area blok migas baru, telah terdapat 21 area yang telah diminati dan terdapat pemenangnya. Pemerintah berharap wilayah-wilayah kerja ini dapat berkontribusi terhadap ketahanan energi Indonesia di masa depan. Kami juga mengimbau agar pemenang lelang dapat melaksanakan komitmen pasti



yang telah ditentukan dengan baik, dan segera menyelesaikan Kontrak Kerja Sama,” urainya.

Saat ini dengan potensi migas yang dimiliki Indonesia, Pemerintah memiliki keyakinan untuk dapat memberikan ketersediaan energi nasional di masa depan. Potensi migas yang telah teridentifikasi terdapat 128 cekungan migas dan hanya sebanyak 20 cekungan migas yang diproduksi.

“Pemerintah telah mengidentifikasi 110 Area potensial yang tersebar

di seluruh nusantara. Ini termasuk 21 Wilayah Kerja telah didapatkan pengelolaanya dari lelang sejak akhir tahun 2024, termasuk 9 Wilayah Kerja yang telah diumumkan tersebut,” tambah Laode.

Untuk mendukung dan memudahkan calon investor melakukan evaluasi dalam memutuskan berinvestasi, Pemerintah saat ini juga tengah melakukan beberapa upaya pendalaman studi maupun akuisisi data di beberapa lokasi yang merupakan bagian dari 110 Area Potensial tersebut. Hal ini sebagai

bentuk nyata bahwa Pemerintah juga akan secara langsung ikut andil dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.

“Pemerintah mengharapkan dengan diumumkannya pemenang lelang ini, potensi yang dimiliki sembilan Wilayah Kerja tersebut dapat segera turut berkontribusi dalam menjaga produksi Migas nasional,” tutup Laode. ●

Pemerintah Lelang 13 Wilayah Kerja

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), mengumumkan Lelang untuk 13 Wilayah Kerja Migas di Tahap I Tahun 2026. Hal ini merupakan upaya Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan energi nasional di masa depan.

Penawaran lelang 13 Wilayah Kerja tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi migas yang melimpah dalam mendukung kebutuhan energi. Penawaran lelang wilayah kerja Migas Tahap I Tahun 2026 diumumkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman pada The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Rabu (20/5/2026).

Laode menyampaikan bahwa saat ini kita tengah menghadapi dua tantangan kritis yaitu memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat sekaligus memenuhi tanggung jawab kita terhadap keberlanjutan iklim, termasuk mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

“Sektor energi Indonesia tengah memasuki era baru, era yang menuntut adanya keseimbangan, inovasi, dan kolaborasi. Kami berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan energi nasional melalui kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan dan peningkatan investasi di sektor hulu migas,” jelas Laode.

“Kami mengundang calon investor dan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kapabilitas serta memenuhi syarat dapat bekerja sama dengan kami untuk mengembangkannya. Kami juga mengundang para penyedia teknologi untuk mendukung pengembangan sektor hulu migas,” pungkas Laode.

Dari 13 wilayah kerja yang ditawarkan, tujuh di antaranya merupakan area yang sebelumnya telah dilakukan studi oleh Kementerian ESDM, yaitu wilayah kerja Rupa, Puri, Pesut Mahakam, Bengara II, Maratua II, Rombebai dan Jayapura. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya Pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan eksplorasi migas dengan terlebih dahulu melakukan studi mendalam atas potensi migas di wilayah kerja tersebut agar calon investor dapat memperoleh gambaran yang lebih detail terkait

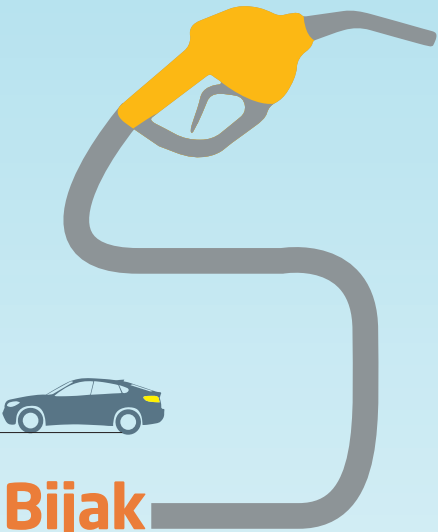
wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang.

Pemerintah Indonesia juga terus berkomitmen untuk mendukung kegiatan hulu migas di tanah air dengan melakukan pembenahan pengelolaan usaha migas. Pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti meningkatkan porsi bagi hasil untuk Kontraktor, pemberian 10% FTP, pemberian nilai minimum Signature Bonus berdasarkan risiko, fleksibilitas dalam memilih skema kontrak baik secara *Cost Recovery* maupun *Gross Split*, 100% harga DMO, tidak ada kewajiban relinquishment dalam 3 tahun pertama komitmen, dan kemudahan dalam mengakses data melalui keanggotaan di *Migas Data Repository*.

“Pembenahan ini diharapkan dapat memberikan rasa percaya diri bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Kontraktor juga akan mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi kendala ekonomi, Kontraktor dapat mengajukan insentif untuk mengembangkan Wilayah Kerja yang dikelola,” jelas Laode. ●

No.	Wilayah Kerja	Luas (km2)	Bentuk Kontrak Bagi Hasil	Mekanisme Penawaran
1.	Natuna D-Alpha	10.211,85	<i>Cost Recovery</i>	Penawaran Langsung
2.	Sapukala	8.474,5	<i>Gross Split</i>	Penawaran Langsung
3.	Rupa	7.843,66	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
4.	Puri	4.190,32	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
5.	Pesut Mahakam	1.530,15	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
6.	Bengara II	3.289,67	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
7.	Maratua II	4.350,36	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
8.	Namori	9.769,82	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
9.	South Tanimbar	8.492,49	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
10.	Cerera	7.171,22	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
11.	Areca Bruni	8.480,52	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
12.	Rombebai	7.367,48	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler
13.	Jayapura	7.299,41	<i>Cost Recovery</i> dan <i>Gross Split</i>	Lelang Reguler

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910, Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980



Manfaatkan Energi dengan Bijak

Guna Mewujudkan Ketahanan Energi Untuk Negeri

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910

Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980

www.migas.esdm.go.id



www.migas.esdm.go.id



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



CONTACT CENTER
ESDM 136